

2023

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

KOTA TASIKMALAYA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Tasikmalaya
Tahun 2023


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat 5

C. Ruang lingkup & Sasaran 6

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 8

A. Transformasi Pendidikan; Membangun Masyarakat Madani 8

B. Pendidikan dalam berbagai perspektif 10

C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah 12

D. Urgensi Sinkronisasi Renstra dan Agenda pembangunan Pendidikan dalam pelbagai level 16

1. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan UNESCO 16

2. Isu dan agenda Strategis Pendidikan Dasar UNICEF 17

3. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Dasar World Bank 18

4. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Nasional 19

5. Isu Strategis Pendidikan dalam Visi Indonesia Emas 2045 21

6. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat 22

7. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan di Kota Tasikmalaya 23

E. Pendekatan dan Metodologi 24

1. Metode Pengumpulan Data 24

2. Instrumen dan sumber data Penelitian 24

3. Unit Analisis *25*

4. Kerangka Analisis *25*

A. Profil kota Tasikmalaya 28

1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota 28

2. Kondisi Kependudukan 29

a. Jumlah Penduduk 29

b. Potensi Pengembangan Wilayah 30

3. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan *30*

4. Kondisi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kota Tasikmalaya tahun 2019-2022 ..... *31*

B. Kondisi Pembangunan pendidikan dasar; sebuah kenyataan 35

C. Tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan 42

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA 45
A. Masalah yang Perlu Benahi 45
1. Pendidikan Formal 45
2. Pendidikan Nonformal (PNF) 47
3. Administrasi dan Manajemen 48
B. Tantangan ke Depan 49
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan 51
C. Arah Kebijakan Pendidikan Dasar 54
1. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan 57
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing 58
D. Rencana Strategis Program Pembangunan Pendidikan tahun 2024-2029 59
BAB V 68
PENUTUP 68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 yang berbunyi:

> "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Begitu pula dalam Pasal 31 menyatakan bahwa (1)Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat UUD tersebut dipertegas dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sebagai komitmen pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah telah menjabarkan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional melaui 4 (empat) periodisasi target dan *milestone* pendidikan nasional jangka panjang 2005-2025. Periode 2005-2010 sebagai fase peningkatan kapasitas dan modernisasi, Periode 2010-2015 sebagai fase penguatan pelayanan, Periode 2015-2020 sebagai fase daya saing regional dan fase terakhir Periode 2020-2025 sebagai fase daya saing internasional.

Kota Tasikmalaya dengan luas 17.156,20 hektar terbagi atas 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk kota Tasikmalaya adalah 733.467 jiwa yang terbagi sebanyak 372.285 laki-laki dan 361.182 perempuan dengan proporsi terbesar di kelompok usia sekolah sekitar 32%. potret ini memestikan pelayanan pendidikan untuk semua hadir di kota tasikmalaya sebagai perwujudan dari prinsip *education for all*.

Pertama, Berdasarkan data BPS tahun 2023, capaian IPM kota Tasikmalaya tahun 2022 ada di angka 73,83 yang berarti berada di level tinggi. Capaian IPM di atas merupakan agregasi dari 3 (tiga) variable yang diukur yaitu Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Variabel pendidikan yang diukur adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS dan HLS kota Tasikmalaya tahun 2022 ada di angka 9,53 dan 13,47. Ini berarti rata-rata lama sekolah warga usia 25 thn ke atas baru menamatkan sekolah sampak kelas X (SMP) dan anak-anak usia sekolah warga diharapkan dapat mengenyam pendidikan sampai dengan D.III (Perguruan Tinggi).

Kinerja pendidikan di atas menunjukkan tren pencapaian yang cukup meningkat, walaupun apabila disandingkan dengan renstra kota tasikmalaya pada fase ini menargetkan pencapaian atau penuntasan wajar dikdas 12 tahun. Pemerintah masih perlu ekstra bekerja agar target capaian tersebut tuntas di tahun 2025. Program-program prioritas perlu dikembangkan secara inovtif untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau dan merata. Berbagai hal terkait dengan akses ini seperti jumlah dan persebaran sekolah, daya tampung, angka partisipasi (APK/ APM) harus ditingkatkan. Persoalan klasik seperti anak putus sekolah atau DO baik karena alasan akses atau persoalan ekonomi harus menjadi perhatian utama. Poin utama di sini adalah tingkat partisipasi sekolah harus ditingkatkan, bagaimana hak setiap anak untuk terus belajar sampai tuntas, tidak ada yang putus sekolah harus jadi atensi begitu pula perlu ada afirmasi anak-anak usia sekolah yg sudah putus sekolah untuk kembali bersekolah dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.

Kedua, Selain hal tersebut di atas, persoalan mutu pendidikan pun harus menjadi sorotan utama. Abad 21 ini adalah abad *borderless*, mutu manusia indonesia dengan mudah disandingkan dengan mutu negara-negara di dunia. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat semakin mempertegas pentingnya peningkatan mutu anak-anak kita supaya memiliki daya saing tinggi dan kompetitif. Selain hal tersebut, disrupsi di sektor pendidikan pun mempertegas pentingnya penguatan karakter dan budaya bangsa. Sekolah/ madrasah harus terus berbenah, beradaptasi dengan jaman dan kebutuhan anak yang semakin tinggi dan kompleks.

Terjadinya berbagai perilaku menyimpang baik dari kalangan peserta didik maupun guru harus jadi pelajaran berharga. Krisis dan dekadensi moral seringkali terjadi di dunia persekolahan. Fenomena kekerasan dan *bullying*, geng motor, tawuran peserta didik dan penduduk di medsos,kasus narkoba serta pelecehan guru terhadap peserta didik dan fenomena krisis moralitas lainnya telah menjadi "tamparan" bagi dunia pendidikan. Pendidikan dianggap gagal dalam mendidik manusia seutuhnya seperti yang diamanatkan dalam UU tujuan pendidikan nasional. Persoalan akhlak dan budi pekerti menjadi persoalan penting dalam mutu pendidikan. Pendidikan selama ini orientasinya terlalu parsial, terlalu kognitif sentris dan abai dalam pewarisan dan pemberdayaan nilai-nilai dan norma agama. Proses pendidikan belum holistic dan integrative, banyak persoalan terkait dengan mutu pendidikan ini, baik dari aspek mutu ilmu pengetahun yang diajarkan, akhlak mulia maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Dari sisi ini, pemerintah harus mampu mengembangkan ekosistem pendidikan yang dapat mendesain mutu pendidikan yang holistic dan integrative.

Dari aspek mutu hasil belajar, berdasarkan hasil survey FISA, Indonesia jauh berada di urutan terbelakang dan sangat memprihatinkan. Secara nasional, Hasil survei PISA 2018 sebagaimana dikutip dari OECD menempatkan Indonesia di urutan ke 74 alias peringkat keenam dari bawah. Kemampuan membaca peserta didik Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan Matematika mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71. Posisi ini sangat mengkhawatirkan, sudah alih-alih pembelajaran kita terlalu kognitif sentris ternyata materi yang diajarkan pun masuk kategori pengetahuan rendah (LOTS).

Pada konteks mutu pendidikan di kota Tasikmalaya terhadap nasional, berdasarkan data yang tersedia mutu sekolah dan lulusan sudah cukup baik dari angka nasional. Tetapi pada aspek prestasi individu peserta didik, berapa persen dari anak-anak kita yang berprestasi di tingkat nasional maupun international? Begitu juga, hasil UTBK kita apakah sudah ada yang masuk ke rangking 100 besar nasional? Begitu pula, mutu gurunya, seberapa berprestasinya guru-guru yang kita miliki? Berapa jumlah guru yang menjadi guru berprestasi tingkat nasional? Bagaimana skor kelulusan uji kompetensi guru di kota tasikmalaya? Dan banyak hal lagi yang harus menjadi perhatian besar dunia pendidikan kita. Dalam konteks ini, kita perlu mereview sistem pendidikan mikro di kota tasikmalaya. Mutu guru, peserta didik dan kurikulum harus dibangun, perlu dibangun sebuah ekosistem pendidikan yang dapat secara simultan dan bekesinambungan peningkatan mutu pendidikan kita.

Ketiga, berkaitan dengan konteks tata kelola, akuntabilitas dan citra public pendidikan, Beberapa variabel yang relevan antara lain:

1. Akreditasi sekolah: Akreditasi sekolah merupakan hal penting untuk memastikan proses pembelajaran yang berlangsung di kota tasikmalaya berstandar nasional. Standar ini merupakan penilaian lembaga akreditasi sekolah terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah. Variabel ini mencakup penilaian terhadap kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran.
2. Manajemen sekolah: Variabel ini meliputi efektivitas manajemen dan kepemimpinan sekolah, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pembinaan guru, pengawasan, dan evaluasi kinerja sekolah. Manajemen yang baik akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, pengembangan staf, dan pengelolaan sumber daya pendidikan secara optimal.
3. Partisipasi masyarakat: Variabel ini mengacu pada tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dukungan terhadap pendidikan di daerah. Faktor seperti keikutsertaan orang tua dalam kegiatan sekolah, keterlibatan komite sekolah, dan partisipasi dalam program-program pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan citra publik.
4. Transparansi dan akuntabilitas: Variabel ini meliputi tingkat transparansi dalam pengelolaan pendidikan, penyampaian informasi publik tentang kebijakan, anggaran, dan kinerja pendidikan. Selain itu, juga melibatkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk pelaporan yang jelas, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
5. Keterlibatan pihak-pihak terkait: Variabel ini mencakup keterlibatan dan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada, agar jangan sampai proses updating ilmu mandek, perguruan tinggi wajib dilibatkan dalam proses membangun mutu tata kelola pendidikan. Perguruan tinggi selama ini bagaikan menara gading, kurang memahami persoalan-persoalan yang terjadi praksis di sekolah dan masyarakat.

Pemerintah perlu mendorong agar kolaborasi *triple helix* pendidikan terjadi di kota tasikmalaya. Perguruan tinggi, Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu bersama-sama terlibat dalam membangun eksosistem pendidikan di Kota Tasikmalaya secara holistik, integrative dan kolaboratif. Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks peran dan posisi Pemerintah daerah hanya berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, harus memberikan perhatian utama

terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Kualitas pendidikan yang baik akan berdampak positif pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan.

Kota Tasikmalaya punya sejarah dan kental dengan julukan kota Santri atau kota pendidikan. Di sisi lain, kota Tasikmalaya juga dikenal sebagi kota industri rumahan (*home industry*). Dua hal tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki agar desain pendidikan ke depan memiliki perhatian yang sangat besar dalam menghasilkan generasi penerus yang berakhlak mulia dengan "jiwa santri"nya dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan kreatif. Ke depan, desain pendidikan di kota tasikmalaya perlu mempertimbangkan variable kekuatan kultural tersebut sebagai dasar dari pengembangan pendidikan yang berdaya saing tinggi dan berakar pada nilai kearifan lokal. *"Tink globally act locally".*

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap potret pendidikan dasar di kota Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan renstra peningkatan mutu pendidikan dasar di kota Tasikmalaya. Kajian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan dasar, termasuk potensi dan tantangan yang dihadapi. Dari hasil kajian tersebut, dapat diketahui langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di kota Tasikmalaya sehingga tercapai tujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Tasikmalaya.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud dari kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang potret pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya. Dari kajian tersebut, diharapkan dapat diketahui secara lebih rinci mengenai kondisi eksisting pendidikan dasar di kota Tasikmalaya, termasuk kendala, tantangan, dan potensi yang ada. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan saran bagi pemerintah daerah khususnya *stakeholders* dalam menyusun program kerja peningkatan mutu pendidikan dasar yang efektif dan efisien untuk masa depan di kota Tasikmalaya.

Secara khusus, tujuan dari kajian tersebut antara lain:

1. Mendeskripsikan Kondisi Pembangunan Pendidikdan Dasar di Kota Tasikmalaya
2. Menganalisis Permasalahan, tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya.

3. Memberikan Rekomendasi Arah Kebijakan dalam menyusun strategi program untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya.

Kajian ini memiliki beberapa manfaat yang penting, antara lain:

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi pendidikan dasar di kota Tasikmalaya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
2. Membantu pemerintah daerah dalam memahami kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.
3. Menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam merencanakan strategi dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan efektif dalam jangka panjang.

C. Ruang lingkup & Sasaran

1. Ruang lingkup dalam kajian ini meliputi:
   a. Kondisi eksisting penyelenggaraan pendidikan dasar di kota Tasikmalaya dalam jalur pendidikan formal, non-formal dan informal
   b. Tujuan dan Sasaran pembangunan pendidikan dasar di kota Tasikmalaya dalam penyusunan RPJMD kota Tasikmalaya
   c. Menyusun Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan pendidikan yang mencakup
      1) Peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan
      2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan daya saing pendidikan
      3) Peningkatan Tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

2. Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh *stakeholders* pendidikan di kota Tasikmalaya.


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Transformasi Pendidikan; Membangun Masyarakat Madani

Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyak upaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Seiring perjalanan jaman dan semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang harus diwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orang tua semakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Dan sejak saat itu, mulailah ada upaya-upaya pembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan para anaknya.

Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembangan jaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan. Munculnya pendidikan persekolahan ini pada awalnya adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyempurnakan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Di mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yang namanya 'sekolah' ini hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat dan jelimet. Dan pada saat sekarang, 'sekolah' tersebut cenderung menganggap dirinya sebagai satu-satunya wadah pembelajaran bagi kelanjutan generasi. Kebanyakan orang sering melupakan bahwa pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dan dipelajari di 'sekolah'.

Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yang disebut sekolah tersebut kebanyakan orang sering mengidentikkan dengan pendidikan; Manakala membicarakan pendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan; Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistem pembangunan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Belajar dari pengalaman, dimaklumi bahwa setiap permasalahan yang dihadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapat belajar bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang akan mampu berperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sudah merupakan suatu keharusan untuk segera diupayakan secara terencana, terarah, dan terkendali.

Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan kecuali hanya melalui pendidikan, dan karenanya hanya melalui peningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan berbagai upaya pula telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat dan bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan oleh ketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yang komprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Di samping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yang dilakukan pun hampir selalu mengarah pada *input oriented* dan *macro oriented*. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampir pada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhan semua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengan keyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan satuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut objek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaan pembangunan.

Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandang dari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna *imperative* yang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek dan metodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikan sepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukan pada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikan mempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigma ketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek ontology, aksiologi dan

epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktek kependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentuk konstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebut sebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasi teori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigma keilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosial lainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikan mempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigma keilmuan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkat kendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikan yang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telah terbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yang kurang kreatif. Karena itu, untuk melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia, tidak ada altematif lain kecuali melakukan pembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemen pembangunan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pandangan nilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etika dalam arti 'baik' atau 'tidak baik', namun lebih ditekankan pada tujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunan pendidikan. 'Nilai' dan tujuan 'baik' dari pembaharuan hanya akan ada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikan harus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat. Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalam pembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis, disintesa, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukan hasil yang lebih bermanfaat.

B. Pendidikan dalam berbagai perspektif

Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yang kesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan amanat UU.No.20 Tahun 2003 pasal l butir 1, pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas,

harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikan harus dilihat sebagai *human investment* yang mempunyai perspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Dalam *perspektif sosial*, pendidikan akan melahirkan insan- insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses transformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal dan horisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukan konstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial *(social cohesion).* Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional. Dalam *perspektif budaya,* pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasi semakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif *(collective conscience)* sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Dalam *perspektif ekonomi,* pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia *(human invesment)* yang akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global.

Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - *education for the knowledge economy* (EKE). Dalam konteks ini, satuan pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan *(research and development),* yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah dengan ketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampu meningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global.

Dalam *perspektif politik,* pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik *(good citizens),* yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass,* yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsa untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama *civil society,* yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang manajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masih dihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Problema-problema yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di daerah, penanganannya memang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragaman letak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, dan bahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alam dan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda.

Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidakseimbangan peran. Bahwa krisis pendidikan disebabkan oleh empat faktor: Pertama, *the increase in popular aspirations for education,* yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, *the acute scarsity of the resources,* yang ditandai oleh kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; Ketiga, *the inherent innertia of educational system,* yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia pendidikan; Keempat, *the innertia of sociaties themselves,* hal-hal seperti sikap tradisional, *prestige and incentive pattern* menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan. Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masih relevan dengan kondisi di Indonesia.

Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan dengan aspek: (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) pemerataan pendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat, dan (5) akuntabilitas. Keenam aspek tantangan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.

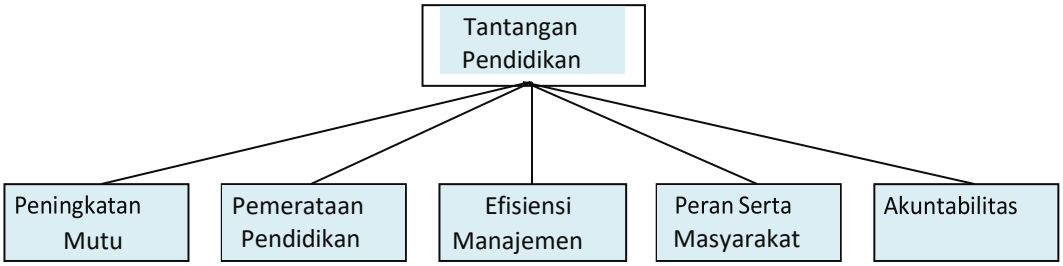

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, *Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan,* Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI.

Gambar 2.1
Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah

Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu:

Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus memenuhi standar internasional.

Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah.

Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan *(technical efficiency)* maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran *(economic afficiency).* Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guinea dan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik.

Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut Djam'an Satori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.

Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing.

Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimana dikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban berat yang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikan manajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apa yang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development* (HCD) yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikan harus disediakan buat masyarakat secara merata *(equality)* dan menjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikan harus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikan mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran dan perubahan di lingkungan kerja.

Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yang kita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikan yang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itu dapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang berani mengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangan 'kebermaknaan'. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa ini semakin 'manja', semakin `konsumtif, kurang `kreatif. Akhirnya, masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapi rendah dalam iman dan ahlaq. Sebetulnya hanya bergelimang dengan 'kefakiran' dan 'kebodohan', yang kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDM- SDM bergelimang dengan 'kekufuran'.

D. Urgensi Sinkronisasi Renstra dan Agenda pembangunan Pendidikan dalam pelbagai level

1. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan UNESCO

Agenda Pendidikan 2030 dari UNESCO adalah rencana strategis global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Agenda ini mencakup tujuan, sasaran, dan indikator untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh dunia. Beberapa target penting dalam agenda ini termasuk meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas, mengurangi kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial dan gender, meningkatkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak miskin, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak pengungsi.

Berikut adalah beberapa milestone atau target yang telah ditetapkan dalam Agenda Pendidikan 2030 UNESCO:

a. Peningkatan akses dan partisipasi: Meningkatkan akses dan partisipasi universal untuk semua anak dan orang dewasa ke dalam pendidikan dasar dan menengah.

b. Peningkatan kualitas dan relevansi: Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah, serta mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara wilayah dan kelompok sosial.

c. Peningkatan keterampilan: Meningkatkan keterampilan dasar dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk keberhasilan di abad ke-21, termasuk keterampilan kognitif, keterampilan sosial, keterampilan emosional, dan keterampilan digital.

d. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan: Memperkuat kualitas dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan relevan.

e. Peningkatan pembiayaan dan kerja sama internasional: Meningkatkan pembiayaan pendidikan, memperkuat kerja sama internasional dalam pendidikan, dan memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

f. Peningkatan pemantauan dan penilaian: Meningkatkan pemantauan dan penilaian sistem pendidikan, serta memperkuat kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data

pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Agenda Pendidikan 2030 UNESCO bertujuan untuk mencapai perbaikan signifikan dalam kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh dunia. Milestone atau target ini harus dicapai pada atau sebelum tahun 2030.

2. Isu dan agenda Strategis Pendidikan Dasar UNICEF

Rencana Strategis Pendidikan Dasar Global dari UNICEF adalah rencana strategis global yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan hasil pendidikan dasar di seluruh dunia. Rencana ini mencakup tujuan-tujuan seperti meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dasar, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, meningkatkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan dasar, serta memperbaiki sistem penilaian dan pengukuran hasil pendidikan.

UNICEF juga telah menetapkan beberapa milestone atau target dalam Renstra Pendidikan Dasar mereka. Beberapa di antaranya adalah:

a. Peningkatan akses: Memastikan bahwa semua anak-anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang berkualitas tanpa diskriminasi dan mengurangi kesenjangan akses antara kelompok-kelompok yang berbeda.

b. Peningkatan kualitas: Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan memperkuat kurikulum, meningkatkan kualitas guru dan pelatihan mereka, dan memperkuat sistem pemantauan dan penilaian.

c. Peningkatan partisipasi dan retensi: Meningkatkan partisipasi dan retensi anak-anak dalam pendidikan dasar dengan meningkatkan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak, serta mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi absensi dan putus sekolah.

d. Peningkatan kesetaraan gender: Meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dengan mempromosikan kesetaraan akses, mengurangi kesenjangan gender dalam retensi dan pencapaian akademik, serta mempromosikan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak perempuan.

e. Peningkatan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dengan memperkuat kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta mempromosikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama.

f. Peningkatan tanggung jawab pemerintah: Memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dan mengelola pendidikan dasar dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan, memperkuat kebijakan pendidikan, dan memperkuat kapasitas sistem pendidikan untuk mengelola pendidikan secara efektif.

3. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Dasar World Bank

Roadmap Pendidikan Dasar Global dari World Bank adalah rencana strategis global untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar di seluruh dunia. Rencana ini mencakup tujuan-tujuan seperti meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dasar, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, meningkatkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan dasar, serta meningkatkan keterampilan dasar dalam bidang literasi dan numerasi. Roadmap ini juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki pendidikan dasar.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, roadmap dan rencana strategis ini menyarankan berbagai program dan kebijakan, seperti meningkatkan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional guru, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, serta meningkatkan pembiayaan pendidikan dari pemerintah dan swasta.

World Bank juga memiliki beberapa milestone atau target dalam Pendidikan Dasar Global mereka. Beberapa di antaranya adalah:

a. Meningkatkan akses: Menyediakan akses pendidikan dasar yang setara dan berkualitas bagi semua anak, termasuk anak-anak yang hidup di daerah terpencil, miskin, atau berasal dari kelompok minoritas.

b. Meningkatkan kualitas: Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan meningkatkan kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan bahan ajar yang berkualitas.

c. Meningkatkan efisiensi: Meningkatkan efisiensi pendidikan dasar dengan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan keuangan, serta memperbaiki tata kelola dan manajemen pendidikan.

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran: Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep akademik, memperkuat keterampilan belajar peserta didik, dan memperkuat pengawasan dan penilaian untuk mengukur kemajuan peserta didik.

e. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik: Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan meningkatkan pengembangan profesional, pelatihan, dan dukungan untuk guru.

f. Meningkatkan keterlibatan masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dasar dengan membangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta memperkuat dukungan masyarakat untuk pendidikan.

World Bank berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam Pendidikan Dasar Global mereka dan bekerja sama dengan mitra internasional dan nasional untuk memperbaiki pendidikan dasar di seluruh dunia.

4. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional Indonesia adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai panduan dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Renstra ini mengatur tujuan, strategi, program, kebijakan, dan indikator pencapaian yang menjadi acuan bagi Kemendikbudristek serta seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan pendidikan nasional Indonesia.

Renstra Pendidikan Nasional Indonesia terdiri dari tiga periode yaitu 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2035, dengan fokus pada lima prioritas pembangunan pendidikan nasional, yaitu:

a. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah: Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah dalam rangka menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan berkarakter.
b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini: Menyediakan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak dini.
c. Penguatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi: Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
d. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi: Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.
e. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan inklusif dan layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus: Meningkatkan

akses dan kualitas pendidikan inklusif serta layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus untuk menjamin hak pendidikan yang sama bagi semua anak.

Selain itu, Renstra Pendidikan Nasional Indonesia juga menetapkan beberapa prioritas strategis, antara lain: pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penguatan sistem pembiayaan pendidikan.

Memahami milestone (tonggak sejarah) Renstra Pendidikan Nasional penting sekali, karena memberikan gambaran tentang arah kebijakan pendidikan nasional di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam setiap periode tahapan, terdapat tujuan dan target spesifik yang harus dicapai untuk mencapai visi dan misi pendidikan nasional.

Dengan memahami milestone tersebut, kita dapat mengevaluasi capaian kinerja pendidikan nasional dan mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemahaman tentang milestone pendidikan nasional juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan yang lebih relevan dan efektif di masa depan.

Berikut adalah gambaran milestone Renstra Pendidikan Nasional di setiap periode tahapan:

1) Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009:
    a) Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan
    b) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
    c) Peningkatan manajemen pendidikan
2) Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014:
    a) Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan yang berkualitas
    b) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang berdaya saing global
    c) Penguatan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel
3) Renstra Pendidikan Nasional 2015-2019:
    a) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah
    b) Meningkatkan partisipasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan

c) Meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik dan efektif

4) Renstra Pendidikan Nasional 2020-2024:

a) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman

b) Meningkatkan partisipasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah

c) Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, serta mendukung penguatan sistem penjaminan mutu

5. Isu Strategis Pendidikan dalam Visi Indonesia Emas 2045

Isu strategis dalam visi Indonesia Emas 2045 di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Akses Pendidikan yang Merata: Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini melibatkan pemenuhan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk gedung sekolah, guru, dan fasilitas pendukung lainnya. Upaya juga harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara pulau-pulau di Indonesia.
b. Kualitas Pendidikan yang Unggul: Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif secara global. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif.
c. Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Nasional: Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai yang kuat. Isu strategis dalam visi Indonesia Emas 2045 adalah memastikan bahwa pendidikan mencakup pembangunan karakter yang kuat, seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang bertanggung jawab, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
d. Riset dan Inovasi dalam Pendidikan: Pengembangan riset dan inovasi dalam pendidikan merupakan isu strategis lainnya. Dalam visi Indonesia Emas 2045, penting untuk mendorong penelitian-penelitian yang inovatif dalam pendidikan, baik dalam pengembangan metode pembelajaran maupun penggunaan teknologi pendidikan yang mutakhir. Riset dan inovasi akan membantu meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pendidikan, serta mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

e. Pendidikan Inklusif: Visi Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya pendidikan inklusif, yang memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini melibatkan pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, peningkatan pelatihan guru dalam menghadapi kebutuhan khusus, dan pengembangan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik.

6. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJM daerah prov. Jawa Barat, tahun 2023 adalah awal dari fase kelima (terakhir) yaitu fase 2023-2025 dengan Visi Provinsi Jawa Barat "mencapai keunggulan di segala bidang, berkelanjutan dan semakin meningkat" Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Indikator nya daya saing makin unggul dibanding provinsi lain dengan proyeksi IPM sebesar 82,57- 83,07.

Prioritas pembangunan bidang pendidikan pada tahapan ini adalah:

a. Pemantapan rintisan program wajib belajar 12 tahun yang dilakukan di seluruh kabupaten/ kota di Jawa barat. Programnya berupa peningkatan akses layanan pendidikan tinggi melalui beapeserta didik bagi yang tidak mampu dan beapeserta didik berprestasi dari setiap kabupaten/ kota.

b. Pengembangan Lembaga Pendidikan tinggi di kabupaten/ kota yang berbasis pada keunggulan daerah dan berelevansi terhadap kebutuhan kerja.

c. Pengembangan kelembagaan PAUD menuju pendidikan dasar 9 tahun

d. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi bertaraf international yang memiliki keunggulan komparatif dalam era global yang didukung oleh pengembangan kurikulum international berbasis kompetensi.

e. Pengembangan PKBM yang mandiri untuk pengembangan keterampilan dan penguasaan IPTEKS.

f. Pemantapan kerjasama pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi melalui implementasi hasil-hasil penelitian dan penguatan peran serta SDM perguruan tinggi dalam pembangunan.

7. Isu dan Agenda Strategis Pendidikan di Kota Tasikmalaya

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 adalah: **"Dengan Iman Dan Takwa Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju Di Jawa Barat"**

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.

2) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.

3) Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.

4) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.

5) Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

6) Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.

7) Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan, Arah pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.

2) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.

4) Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.

5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.

6) Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.

7) Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

E. Pendekatan dan Metodologi

1. Metode Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan meliputi analisis data sekunder dan FGD untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi, seperti data statistik dan dokumen kebijakan terkait pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi temuan yang relevan.

2. Instrumen dan sumber data Penelitian

a. Studi Dokumentasi dari sumber data yang tersedia berupa:

1) Perangkat perundang-undangan yang menjadi penentu dan arah penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan tingkat kota.

2) Perangkat proses manajemen penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tingkat kota.

3) Lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik proses penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan unsur lokasi, peristiwa-peristiwa serta aset-aset yang menjadi hak dan

kewajiban masyarakat dan pemerintah kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Kegiatan *Focus Group Disscussion* dengan tujuan menggali (*brainstorming)* ide, program, permasalahan dari berbagai sumber dan pihak seperti pakar perguruan tinggi dan pemerintah, SKPD terkait dan unsur masyarakat penyelenggara pendidikan sebagai bentuk Uji public.

3. Unit Analisis

Unit Analisis bagi kepentingan kajian ini meliputi 1). Pemerintah daerah khususnya SKPD terkait; 2). Unsur Masyarakat Penyelenggara Pendidikan. Adapun dokumen-dokumen seperti a). Renstra Pendidikan Nasional; 2). Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 3). Renstra Pendidikan Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya; 4). Perda RT/RW; 5). RPJPD kota Tasikmalaya; 6). RPJMD kota Tasikmalaya; 7). RPJPD Prov. Jawa barat; 8). RPJP Nasional; 9). Perundang-undangan pendidikan.

4. Kerangka Analisis

Produk akhir dari serangkaian kegiata ini adalah laporan kajian strategis peningkatan mutu pendidikan di kota Tasikmalaya. Hasil kajian ini dapat menjadi salah satu sumber data dan informasi untuk penyusunan renstra pembangunan di kota Tasikmalaya dalam bidang pendidikan.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kajian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

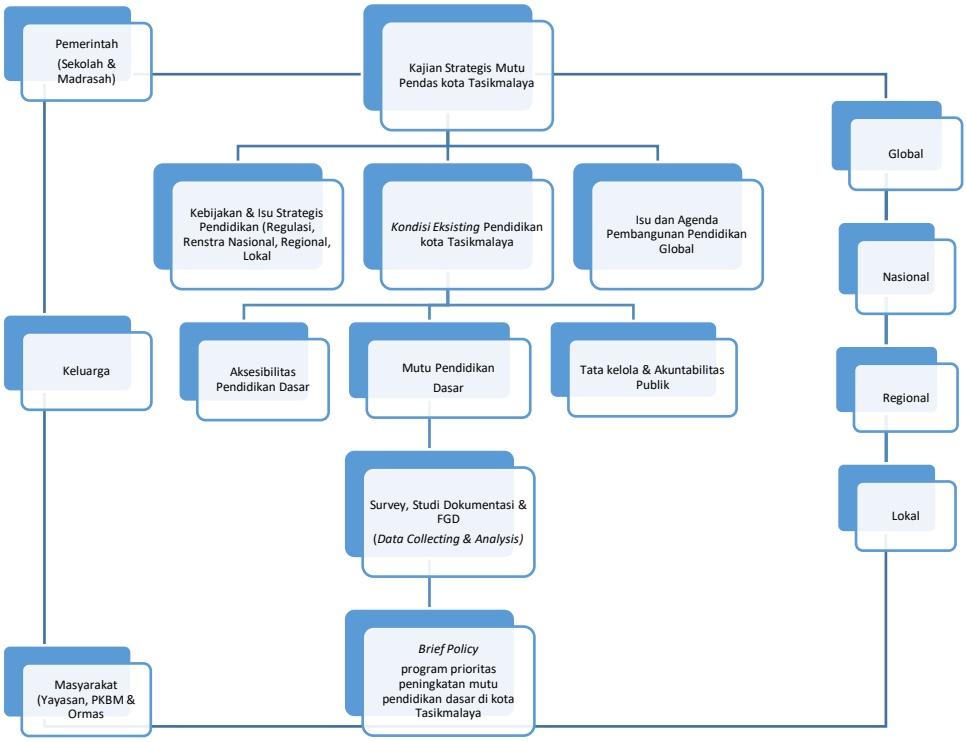
Pemerintah
(Sekolah & Madrasah)
Kajian Strategis Mutu Pendas kota Tasikmalaya
Global
Kebijakan & Isu Strategis Pendidikan (Regulasi, Renstra Nasional, Regional, Lokal
Kondisi Eksisting Pendidikan kota Tasikmalaya
Isu dan Agenda Pembangunan Pendidikan Global
Nasional
Keluarga
Aksesibilitas Pendidikan Dasar
Mutu Pendidikan Dasar
Tata kelola & Akuntabilitas Publik
Regional
Survey, Studi Dokumentasi & FGD
(*Data Collecting & Analysis)*
Lokal
Brief Policy
program prioritas peningkatan mutu pendidikan dasar di kota Tasikmalaya
Masyarakat (Yayasan, PKBM & Ormas


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

BAB III POTRET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA

A. Profil kota Tasikmalaya

1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara 108^{0}08’38” BT-108^{0}24’02” BT dan antara 7^{0}10’ LS-7^{0}26’32” LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 Hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 Hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kelurahan
1.	Kawalu	Talagasari	42,77	10
2.	Tamansari	Tamanjaya	35,99	8
3.	Cibeureum	Ciherang	19,04	9
4.	Purbaratu	Purbaratu	12,01	6
5.	Tawang	Kahuripan	7,07	5
6.	Cihideung	Argasari	5,49	6
7.	Mangkubumi	Mangkubumi	24,53	8
8.	Indihiang	Sukamaju Kidul	11,04	6
9.	Bungursari	Bungursari	16,90	7
10.	Cipedes	Nagarasari	8,96	4
Jumlah			**183,85**	**69**

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini.

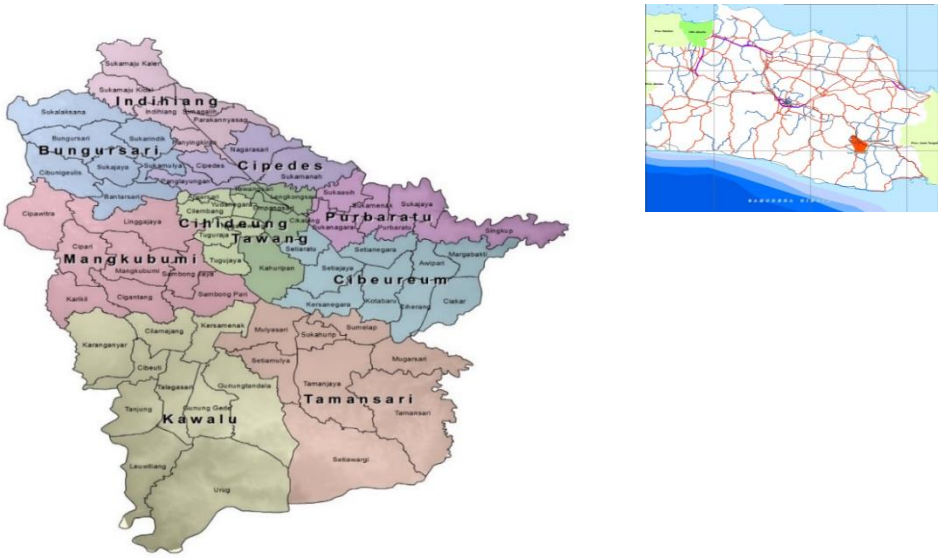

Gambar 3.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya

2. Kondisi Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah 719.882 jiwa, dan terus menurun menjadi 663.986 jiwa pada tahun 2020.

Adapun pertumbuhan penduduknya kurun waktu 2019-2022 berkisar antara 3,13 % per tahun. Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019–2022.

Tabel 3.2.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2019	719.882	9,94
2020	663.986	-7,76
2021	723.921	9,03
2022	733.467	1,32

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Tasikmalaya, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) focus kebijakan yaitu:

a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
    - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
    - pelestarian kawasan cagar budaya; dan
    - penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas

Wilayah Kota.

b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
   - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
   - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:
   - kawasan pusat kota;
   - kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
   - kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
   - kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;

b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi:
   - kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
   - kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.

c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

3. Kondisi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kota Tasikmalaya tahun 2019-2022

Indeks Pembangunan Manusia kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan sebesar rata-rata 1.25 persen pertahun. Jadi dalam empat tahun terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1 poin. Gambar dibawah menunjukan pola pencapaian nilai Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga 2022. Nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat selama periode 2019-2022.

Gambar 3.3
Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2022 kota Tasikmalaya memperoleh nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,83 meningkat sebesar 0,52-point dari tahun 2021. Di tahun 2022 terdapat kenaikan nilai indeks pembangunan manusia yang tertinggi selama periode 2019-2022 yaitu sebesar 0,52 point. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat kenaikan nilai indeks pembangunan yang terendah yaitu sebesar 0,2 point. Perubahan status pembangunan manusia dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya terus meningkat dari tahun ke tahun, status pembangunan manusia Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 masuk kategori tinggi.

a. Perkembangan Indeks Komposit IPM

United Nations Development Programmes (UNDP) telah merekomendasikan penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan waktu lainnya.

Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Tasikmalaya tahun 2020-2022

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru		
	2020	2021	2022
IPM	73,04	73,31	73,83
Umur Harapan Hidup/UHH (tahun)	72,15	72,34	72,63
Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	13,45	13,46	13,47
Rata-rata Lama Sekolah /RLS (tahun)	9,33	9,52	9,53
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)	10 263,00	10 213,00	10 578,00
Indeks Kesehatan	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Tasikmalaya. 2023

b. IPM Bidang Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan dan Rata- Rata Lama Sekolah)

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan gabungan dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. namun rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini karena harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 3.4
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) kota Tasikmalaya

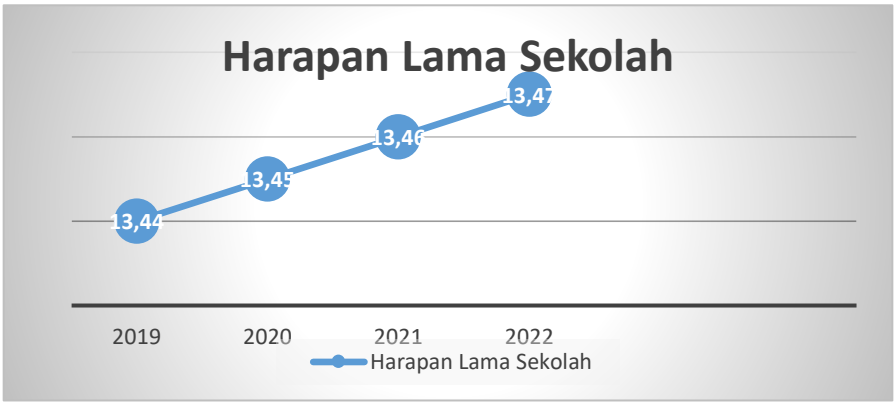

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) kota Tasikmalaya tahun 2022 meningkat 0,01 dari tahun 2021. Secara rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,01 poin selama 2019-2022. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebesar 13,47 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kota Tasikmalaya yang masih bersekolah pada tahun 2022 memiliki harapan untuk menjalani pendidikan formal selama 13,42 tahun.

Sedangkan untuk komponen rata- rata lama sekolah, kota Tasikmalaya mengalami perkembangan yang terus membaik seperti yang tertera pada grafik berikut ini.

Gambar 3.5
Perkembangan Rata- rata Lama Sekolah (RLS) kota Tasikmalaya

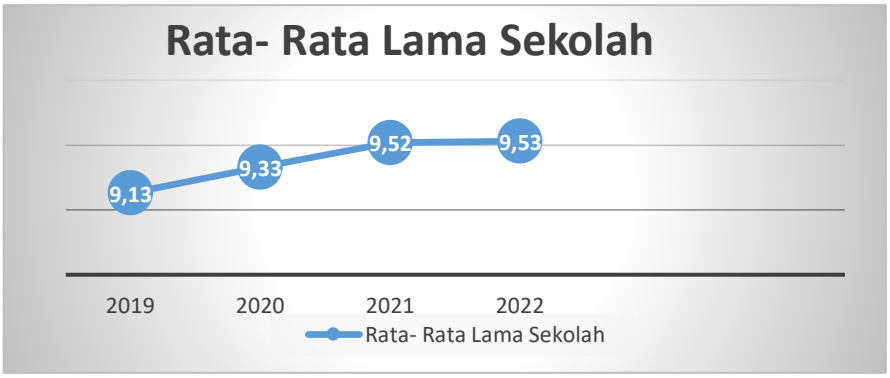

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tasikmalaya tahun 2022 meningkat 0,01 persen dari tahun 2021. Secara rata-rata Angka Rata- rata Lama

Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,37 poin selama 2019-2022. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebesar 9,53 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 rata-rata menjalani pendidikan formal selama 9,53 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama. Variabel Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan kualitas pendidikan suatu masyarakat. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Kota Tasikmalaya yang ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah, akan tetapi pendidikan masih harus menjadi perhatian penting di saat ini. Dilihat dari rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir masih pertumbuhannya sangat lambat, yang menandakan masih membutuhkan usaha keras dari semua pihak untuk meningkatkan partisipasi warga terhadap pendidikan.

B. Kondisi Pembangunan pendidikan dasar; sebuah kenyataan

1. Indeks Pembangunan Manusia

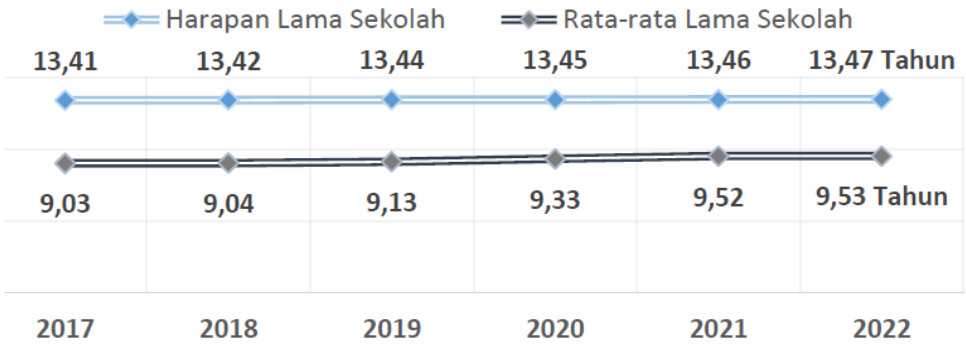

Sumber: BPS, Mei 2023

2. Pembiayaan Pendidikan

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Rp1.701,83 M	Rp1.717,73 M	Rp1.924,7 M

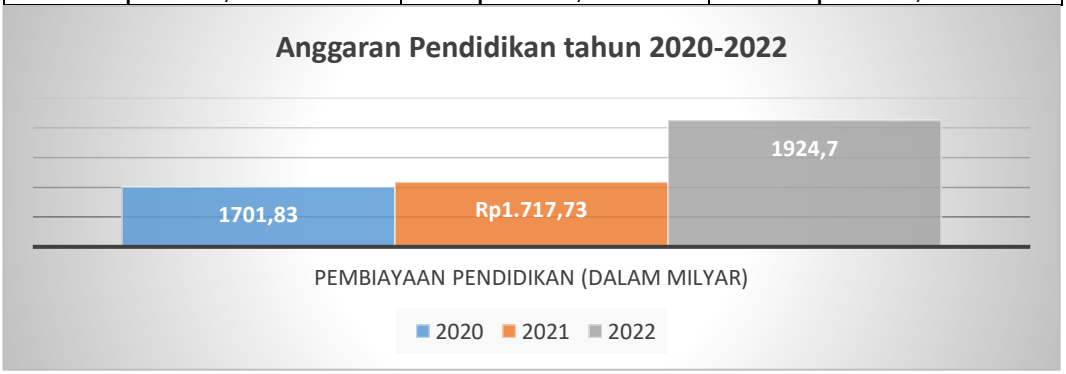

Komponen pembiayaan pendidikan pada tahun 2022 meliputi Anggaran Program Urusan Pendidikan sebesae 541,2 M (28,116%), Transfer Daerah; 252,4 M (13,113%) dan Non Program Urusan Pendidikan; 1.131,2 M (58,771%).

3. Data Satuan Pendidikan (Pra Sekolah, SD, SMP Se-derajat)

a. Pra Sekolah

1) Data Jumlah Pra Sekolah

Jenis	2020	2021	2022
TK	165	159	68
Kober	165	159	68
TPA	3	2	1
RA	139	139	139
Jumlah	**472**	**459**	**276**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

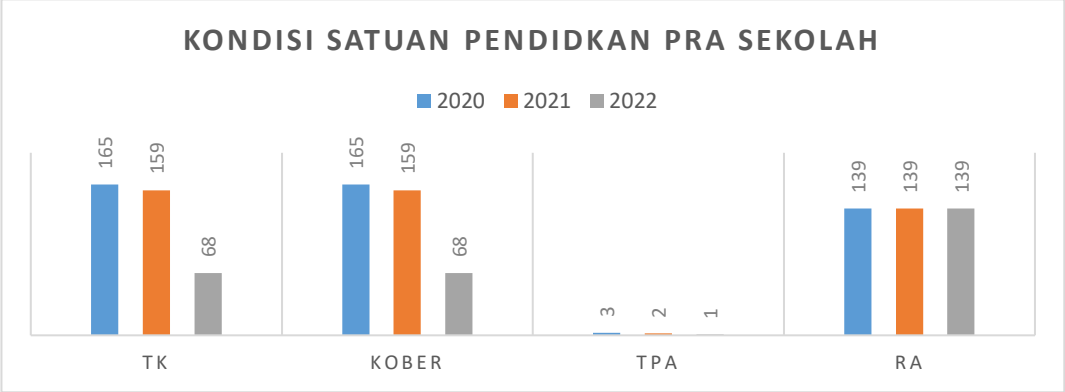

2) Data Peserta Didik Pra Sekolah

Jenis	2020	2021	2022
TK	4924	4485	4697
Kober	5188	5095	5299
TPA	43	45	49
RA	5745	5739	6252
Jumlah	**15.900**	**15.364**	**16.297**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

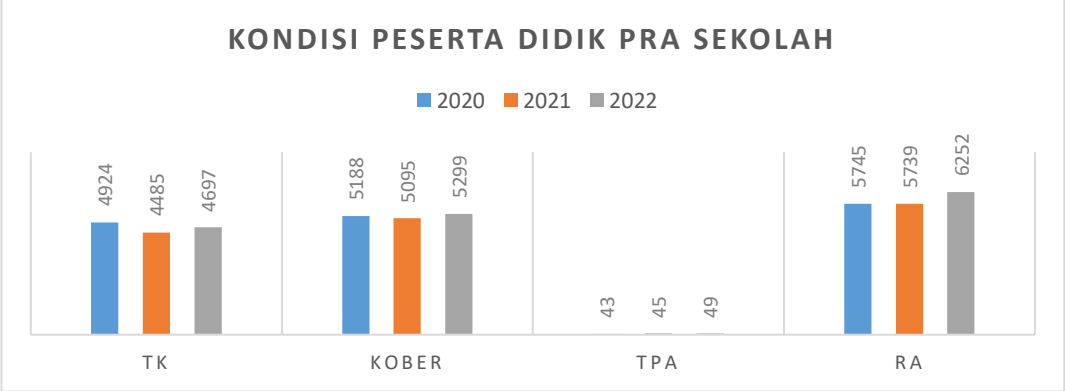

3) Data Guru

Jenis	2020	2021	2022
TK	544	538	546
Kober	12	10	10
TPA	12	10	10
RA	670	673	686
Jumlah	**1.238**	**1.231**	**1.252**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

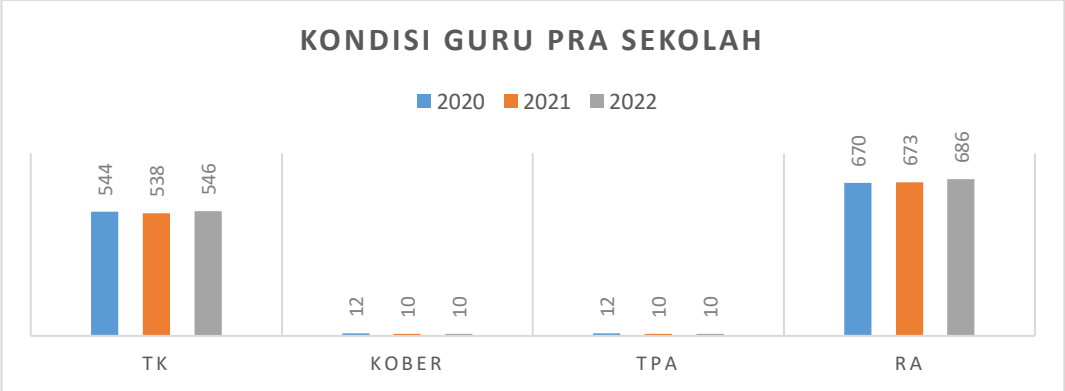

b. SD dan MI

1) Data Jumlah SD dan MI

Jenis	2020	2021	2022
SD	231	232	229
MI	55	55	55
Jumlah	**286**	**287**	**284**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

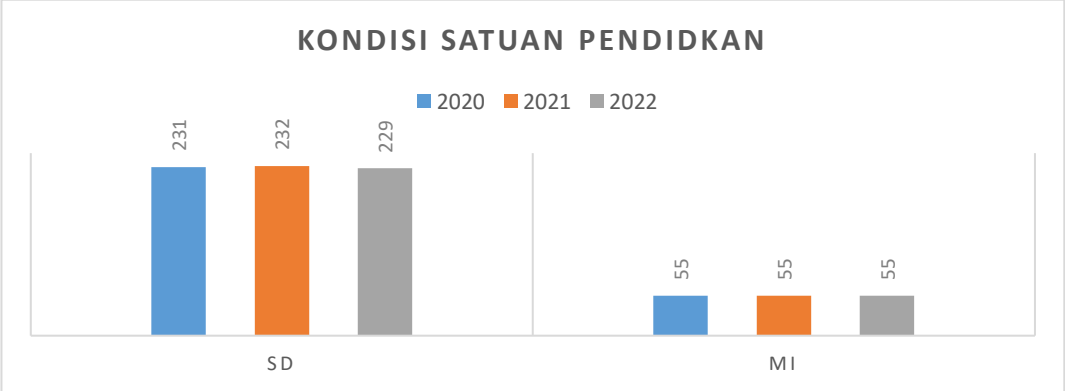

2) Data Peserta Didik SD dan MI

Jenis	2020	2021	2022
SD	63475	62421	62469
MI	10025	10515	10752
Jumlah	**74.500**	**72.936**	**73.221**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

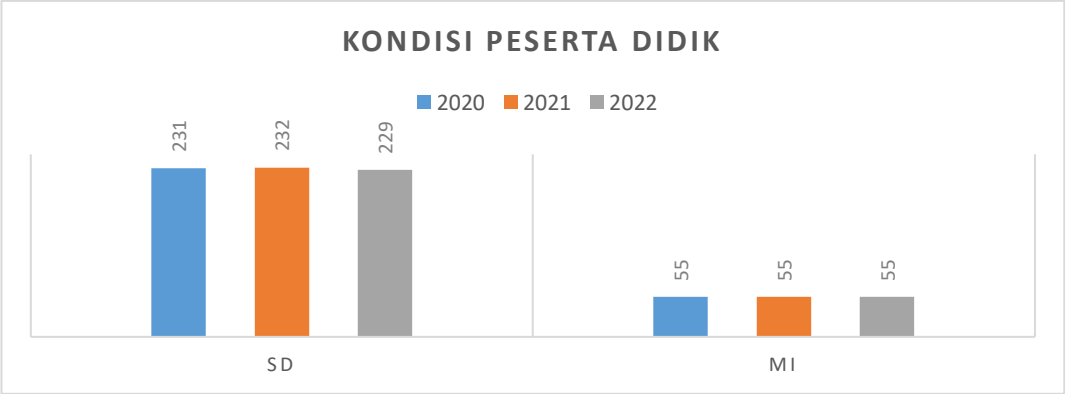

3) Data Guru

Jenis	2020	2021	2022
SD	3234	3191	3101
MI	543	577	566
Jumlah	**3.777**	**3.768**	**3.667**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

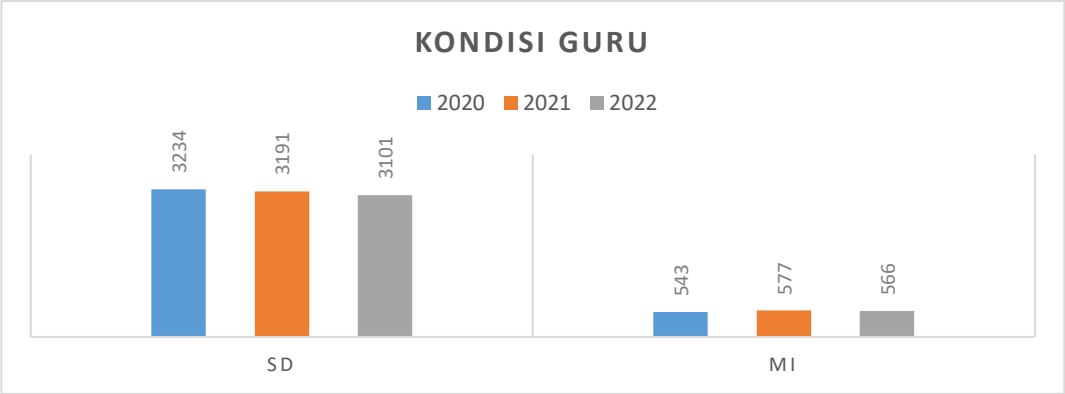

4) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan MI

Angka Partisipasi	2020	2021	2022
APK	100,66	99,28	101,67
APM	94,74	94,79	97,86

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

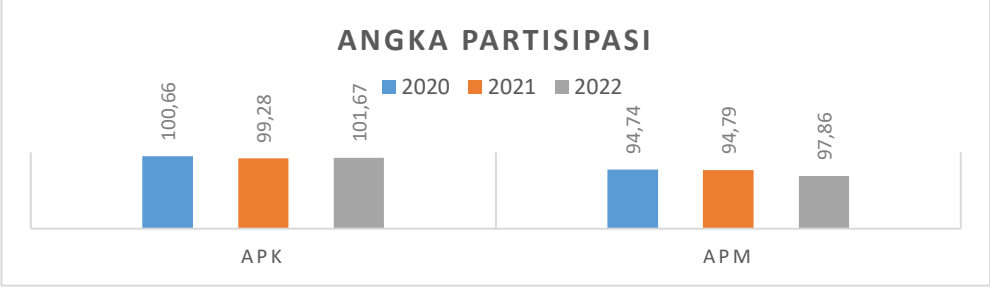

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

c. Jumlah SMP dan MTS

1) Data Jumlah SMP dan MTS

Jenis	2020	2021	2022
SMP	76	81	86
MTs	54	55	55
Jumlah	**130**	**136**	**143**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

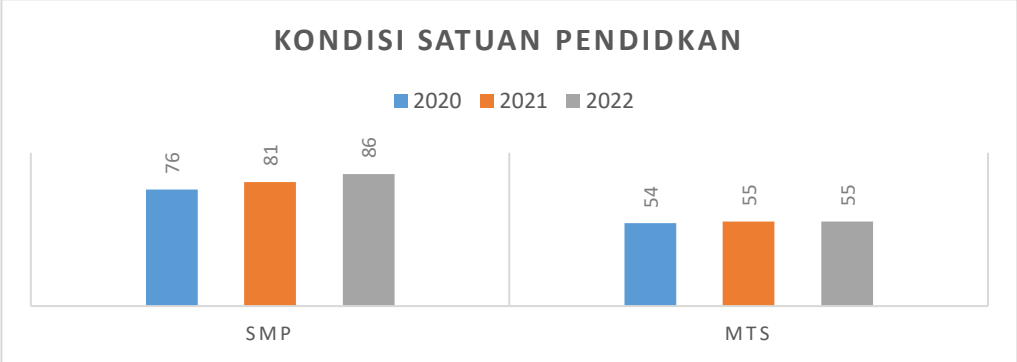

2) Data Peserta Didik SMP dan MTs

Jenis	2020	2021	2022
SMP	28571	28739	28357
MTs	10038	10977	10689
Jumlah	**38.609**	**39.716**	**39.046**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

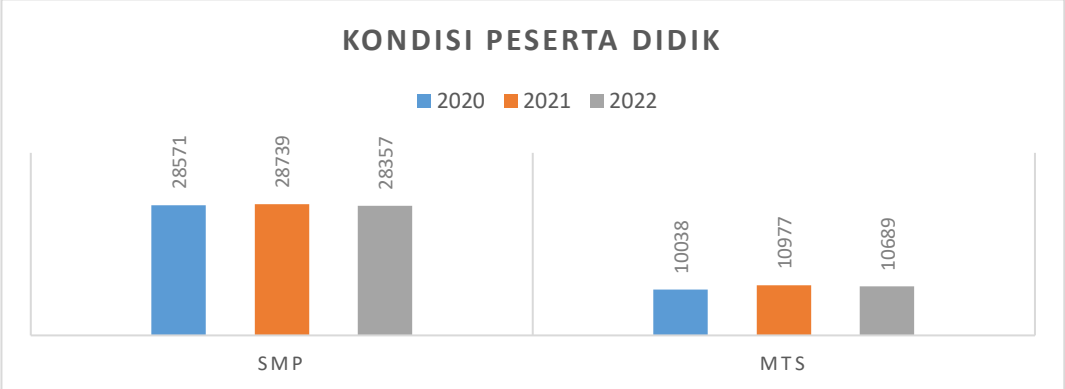

3) Data Guru

Jenis	2020	2021	2022
SMP	1764	1777	1843
MTs	850	913	934
Jumlah	**2.614**	**2.690**	**2.777**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

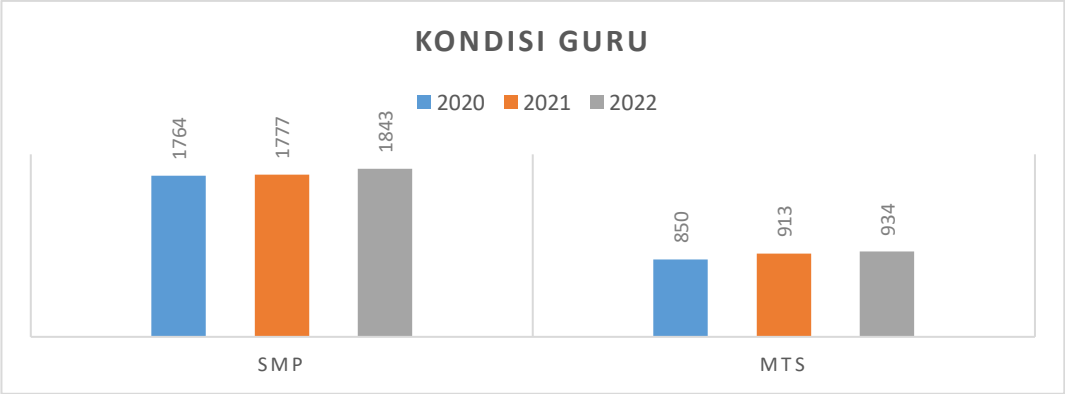

4) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan MI

Angka Partisipasi	2020	2021	2022
APK	94,29	103,13	87,80
APM	81,13	84,84	84,11

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

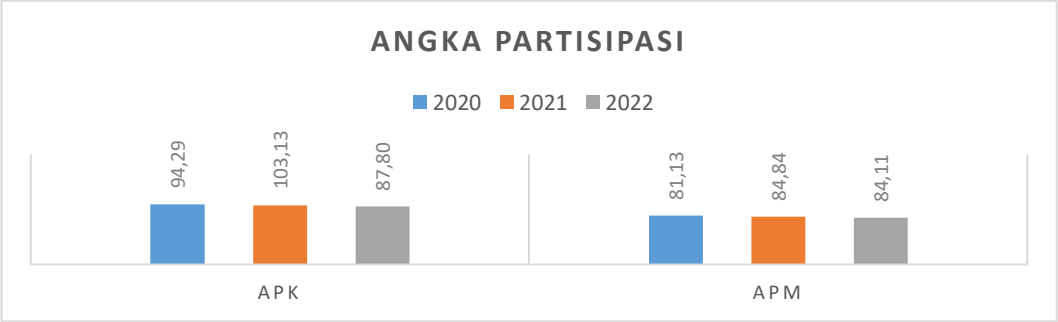

5) Program Beasiswa Indonesia Pintar SD dan SMP

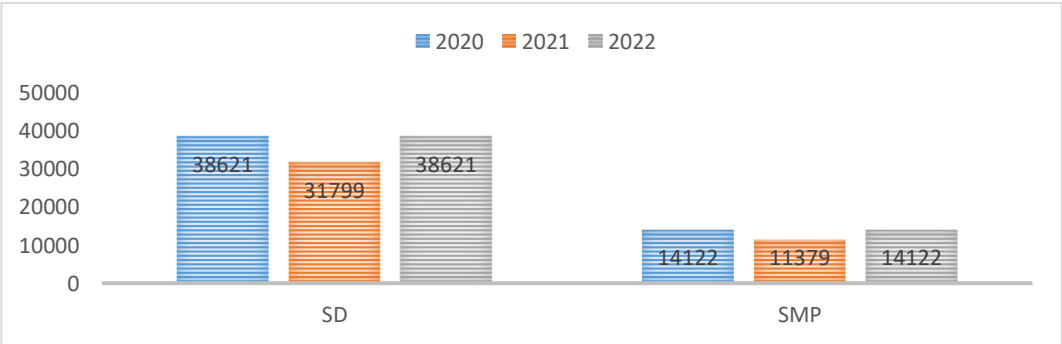

4. Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

a. Data Rasio Guru: Siswa

Guru: Siswa	2020	2021	2022
SD	1:21	1:21	1:20
SMP	1:21	1:17	1:17

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023

b. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

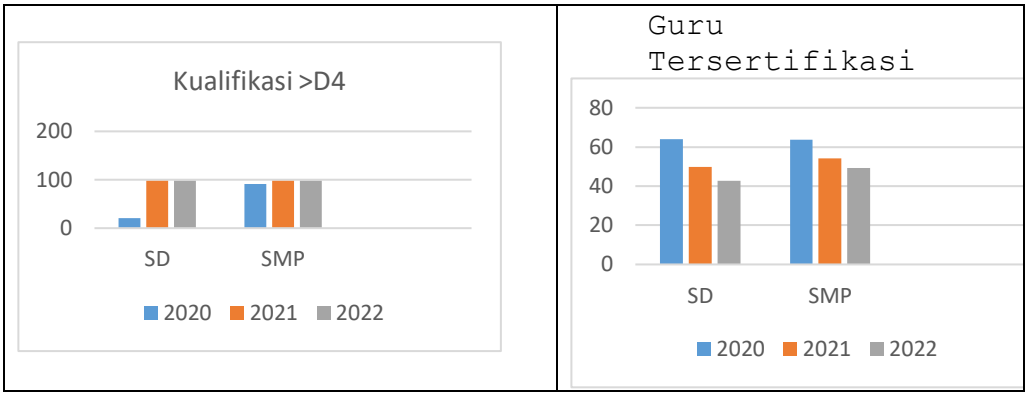

c. Siswa Putus Sekolah

Anak Putus Sekolah	2020	2021	2022
SD	79	33	64
SMP	42	31	20
Jumlah	**121**	**64**	**84**

Sumber : Pusat Data Statistik kota Tasikmalaya tahun 2023



d. Kondisi ruang kelas dan sarana lainnya

2021			2022		
Kategori			Kategori		
Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1469	490	98	1402	521	115

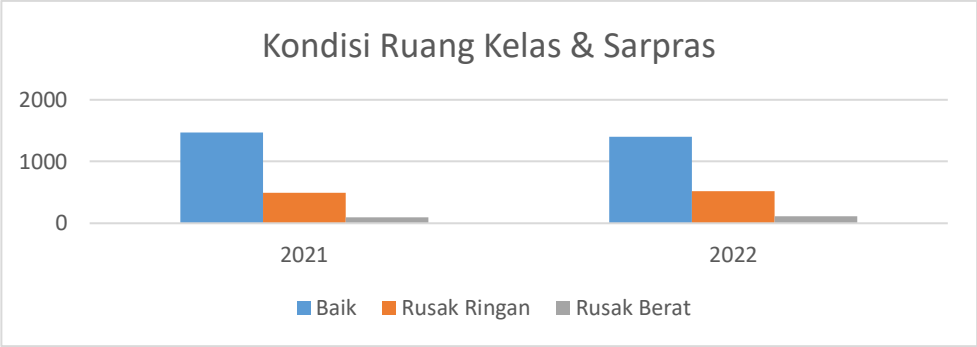

C. Tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan

1. Anggaran untuk pembiayaan Pendidikan di kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar Rp. 1.717,73 Milyar atau sekitar 28,90%. Besaran anggaran tersebut berasal dari dana transfer daerah bidang pendidikan dan alokasi anggaran urusan pendidikan seperti yang tercantum dalam diagram di bawah ini.

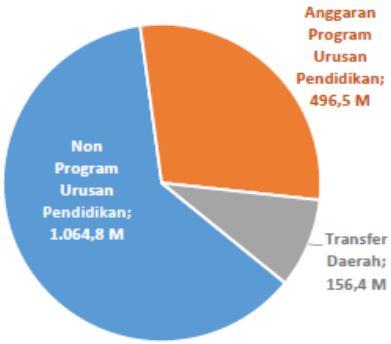

Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

DAK Fisik	6,73 M
TPG	140,16 M
Tamsil	0,55 M
Tunjangan Khusus Guru	0,00 M
DAU (Gaji GTK PNSD)	742,10 M
BOP PAUD	8,98 M

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

PAUD	0,59 M
SD	0,84 M
SMP	0,80 M
SMA	0,00 M
PMPK	0,63 M
Total	2,85 M

Sumber: BPS, 2022 dan Biro Perencanaan, 2021

2. Adapun yang terkait dengan jumlah akreditasi sekolah di SD dan SMP pada tahun 2021 sebagai berikut.

No	Satuan Pendidikan	Jumlah	Sudah Akreditasi	Belum Akreditasi
1	TK	98	81	17
2	SD	232	228	4
3	SMP	81	72	9
4	PKBM	20	15	5
Jumlah		**431**	**396**	**35**

Sumber Data: *Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2021*

Berikut rincian diagramnya :

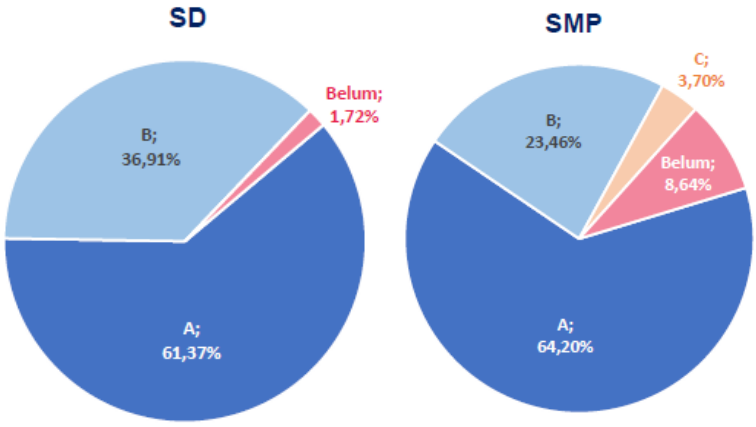


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

Bab IV Analisis Permasalahan, Tantangan dan Strategi Peningkatan Pembangunan Pendidikan Dasar di kota Tasikmalaya

A. Masalah yang Perlu Benahi

1. Pendidikan Formal

Beberapa catatan dari analisis menunjukkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya sampai Tahun 2022, antara lain:

Pertama, data angka partisipasi berdasarkan data dari pemkot Tasikmalaya, sesungguhnya ada keberhasilan yang telah dicapai, umpamanya dalam hal peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI sederajat dari tahun 2019-2021 dari APK 95,29% pada Tahun 2019 menjadi 97,26% pada Tahun 2022. Adapaun APM pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,2%. Pada tingkat SMP/MTs sederajat, APK dari 107,34% pada 2021 menjadi 104,82% pada 2022. Sedangkan APM nya menurun dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 86,65% tahun 2021 menjadi 84,44% pada tahun 2022.

Begitu juga IPM pendidikan kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan baik dari aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kondisi ini, menjadi pertanda baik, bahwa perkembangan pendidikan warga kota Tasikmalaya semakin meningkat dan ini modal besar untuk merealisasikan target wajar dikdas 13 tahun.

Kedua, di samping keberhasilan tersebut di sisi lain masih ditemukan permasalahan pendidikan, seperti berikut:

Masalah Pendidikan Formal	Poin-Poin Masalah
Akses Pendidikan	a. Angka partisipasi kasar PAUD yang masih rendah.
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	b. Kompetensi Guru yang harus terus ditingkatkan profesionalitasnya
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	c. Masih terdapat PAUD, PKBM, Lembaga Kursus dan Keterampilan yang belum terakreditasi;
Akses Pendidikan	d. Masih rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan anaknya di PAUD, sehingga rendahnya APK PAUD;
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	e. Masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik;
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	f. Belum optimumnya Kegiatan kelompok

Masalah Pendidikan Formal	Poin-Poin Masalah
	kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/ MGMP dan supervisi kinerja guru;
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	g. Munculnya pengklasifikasian sekolah favorit dan bukan favorit;
Akses Pendidikan	h. Masih rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan;
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	i. Belum terpenuhinya SPM bidang pendidikan;
Akses Pendidikan	j. Belum meratanya layanan pendidikan;
Akses Pendidikan	k. Rasio kelas dan murid belum sesuai standar;
Akses Pendidikan	l. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
Akses Pendidikan	m. Belum terpenuhinya daya tampung satuan pendidikan;
Akses Pendidikan	n. Belum meratanya layanan penunjang pembelajaran di satuan pendidikan;
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	o. Belum terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat;
Akses Pendidikan	p. Masih adanya jumlah ruang kelas yang rusak walaupun dalam kategori tidak berat yang terjadi di SD/MI dan SMP/MTs.
Akses Pendidikan	q. Masih ada tanah dan bangunan sekolah yang digugat masyarakat lalu disegel oleh pihak-pihak yang mengaku keluarga dari pemilik sah atas tanah yang dipakai bangunan sekolah tersebut, sehingga murid-murid terganggu belajarnya;
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	r. Masih adanya guru yang tidak linear dan relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, sehingga mempersulit dalammengembangkan kariernya;
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	s. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non- ASN dan tenaga kependidikan lainnya;
Akses Pendidikan	t. Masih adanya angka putus sekolah walaupun kecil tetapi dapat mengganggu kepada keberhasilan program wajar dikdas 9 tahun apalagi akan ditingkatkan menjadi 12 tahun.;
Akses Pendidikan	u. Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik

Masalah Pendidikan Formal	Poin-Poin Masalah
	bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya.
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	v. Rendahnya keterampilan guru dalam melayani kebutuhan belajar anak difabel di sekolah inklusi
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	w. Masih terlihat atensi yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, koordinasi kelembagaan dan pengembangan pendidikan tampak parsial;
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	x. Masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	y. Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/ MGMP dan supervisi kinerja guru
Manajemen dan Akuntabilitas Pendidikan	z. Kebijakan kearah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah
Akses Pendidikan	aa. Kuota KIP yang terbatas sehingga masih ditemukan siswa tidak mampu secara ekonomi tidak terlayani beasiswa atau tidak tepat sasaran

2. Pendidikan Non Formal (PNF)

Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikan non formal di Kota Tasikmalaya sampai Tahun 2022 masih ditemukan gambaran bahwa:

a. Eksistensi dan perhatian terhadap PNF perlu terus ditingkatkan dari pemerintah maupun masyarakat, baik berkenaan dengan dukungan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran;
b. Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut membebani dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan;sehingga seringkali terjadi praktik mal-praktik;
c. Masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada sekolah kesetaraan (PKBM) dan lembaga keagamaan;

d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah;

e. Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat;

3. Administrasi dan Manajemen

Problema-problema pokok dalam aspek manajerial kelembagaan berkaitan dengan:

Pertama, perencanaan pembangunan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehensif. *Pendidikan hanyadipandang sebagai sekolah*. Padahal, jenis-jenis kelembagaansatuan pendidikan yang sering terabaikan dan banyak berperan ialah lembaga satuan pendidikan luar biasa, luar sekolah (nonformal), dan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dariaparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristik kelembagaan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis-jeniskelembagaan satuan pendidikan. Sehingga menyebabkan pula kurangnya perhatian pemerintah terutama dalam sistem penganggaran dan pembinaannya;

Kedua, masih lemahnya sistem pengawasan mutu pendidikan, baik yang menyangkut kerangka acuan dan instrumen yang yang digunakan, maupun dalam aspek prosedur pelaksanaannya. Sistem pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif, temporer, dan kurang berkelanjutan, bahkan lebih mengarah pada pelaksanaan pola-pola pengawasan pembangunan di bidang di luar kependidikan yang lebih bersifat mencari-cari kesalahan. Sehingga membuat ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dalam pendidikan;

Ketiga, bahwa data tentang pendidikan,(mulai input, proses, dan output) di Kota Tasikmalaya yang terbatas. Masih sering ditemukan data pendidikan yang kurang terintegrasi secara terpadu, banyak versinya;

Di samping problema dalam manajemen pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu diperhatikan dua kondisisosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya, yaitu:

Pertama, kondisi umum kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya dari sisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Persoalan stunting/gizi buruk, penyakit seperti HIV AIDS, serta penyakit endemis lainnya. Jumlah yang rawan terkena penyakit juga bisa jadi masih akan bertambah jika melihat masih banyaknya jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan masih banyaknya keluarga miskin (Gakin).

Kedua, daya beli masyarakat yang masih rendah. Disadari atau tidak, sekalipun komoditi perekonomian masyarakat semakin sempit, karena terdesak usaha-usaha konglomerasi kaum 'borjuis', Persoalannya ialah, seberapa besar tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap golongan masyarakat seperti itu.

menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab".

Ketiga Apabila Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya betul-betul ingin mengelola s*istem pendidikan* dengan sebaik-baiknya, maka status atau fungsi pengelola pendidikan di setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang ada di lingkungan pemerintahan memerlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang dapat memberikan keleluasaan untuk merubah pola pikir, apresiasi, dan kebiasaan dalam mengelola pendidikan yang lebih akuntabel.Sehingga, *mengelola* sistem pendidikan yang dilakukan baik oleh SKPD (Dinas Pendidikan) maupun unit kerja yang ditugasi (Satuan Pendidikan) terutama pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal berada dalam satuan sistem tata kelola, bukannya terpisah seperti yang sekarang ini.

B. Tantangan ke Depan

Globalisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya pengaruhnya sungguh luar biasa, seluruh tatanan hidup dan kehidupan masyarakat berubah ke arah yang tidak menentu. Secara tidak disadari, globalisasi bukan sajamembawa kehidupan masyarakat ke arah persaingan yang begitu berat, tetapi juga telah melunturkan sendi-sendi keimanannya. Pengaruh yang paling berbahaya dari pengaruh globalisasi bagi masyarakat kota Tasikmalaya ialah lunturnya keimanan sebagai masyarakat yang agamis. Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya, maraknya geng motor yang mengarah kepada kriminalitas, meningkatnya keluarga miskin, meningkatnya penderita HIV/AIDS, dan derajat kesehatan masyarakat yang buruk seperti stunting, turut mempengaruhi kualitas kehidupan dan jati diri sebagai *manusia hati, manusia rasional, dan manusia spiritual,* yang mengemban amanat kelangsungan peradaban masyarakat Kota Tasikmalaya di masa depan.

Gambaran di atas bukan hanya sekedar cerita, bahwa permasalahan mendasar bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) sekarang ini ialah bagaimana mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai berbagai tujuan hidup dan kehidupan yang dicita-citakan. Potensi-potensi tersebut terdiri dari para tenaga kerja, modal, teknologi dan sumber-sumber

alam lainnya. Tenaga kerja dapat dikategorikan menurut pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya, dan sumber-sumber lainnya dapat dikategorikan menurut jumlah dan tingkatan kualitasnya.

Di samping itu, disadari pula bahwa dalam peranan pembangunan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkecimpung dalam dunia internasional, pembangunan SDM di Kota Tasikmalaya pun tidak terlepas darikebijakan pembangunan nasional maupun regional (provinsi). Dan telah menjadi kesepakatan pula bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah kota.

Dengan demikian, dalam rangka upaya pencapaian target IPM berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih terfokus pada pencapaian komponen-komponen pembentuknya yaitu indeks pendidikan, dengan merujuk pada:

Pertama, amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Kemudian, pada pasal 31 ayat (1) mengamanatkan pula bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatpendidikan", pasal 31 ayat (2): "Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pasal 31 ayat (3): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur denganundang-undang". Pasal 31 ayat (4): "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional".

Kedua, amanat UU.No.20/2003 Bab II pasal 3, yang menegaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan, deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), mengamanatkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28C ayat 1: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan.

Keempat, amanat Kerangka Aksi Dakkar (KAD) tentang 'Pendidikan Untuk Semua' (PUS), yang harus diupayakan oleh bangsa-bangsa di dunia.

Kelima, amanat masyarakat Kota Tasikmalaya sebagaimana yang dirumuskan dalam visi pembangunan daerah, yaitu ingin mewujudkan "dengan Iman dan Taqwa, kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan indsutri termaju di jawa barat"

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan

Keenam amanat sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan kerja keras semua pihak, terutama terhadap program-program yang memiliki kontribusi besar terhadap Indeks Pendidikan harus benar-benar dioptimalkan untuk mengejar ketimpangan antara target dengan realisasinya. Untuk sampai pada kondisi tersebut memerlukan dukungan potensi insan-insan yang memiliki kemampuan untuk berkiprah pada jaman tertentu yang sesuai dengan gambaran kondisi yang dicita-citakan masyarakat Kota Tasikmalaya di masa depan.

Secara teoritis, untuk melihat gambaran masyarakat yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebaiknya merujuk konsep evolusi kondisi masyarakat yang dimulai dari kondisi apa yang disebutnya masyarakat peramu sampai pada akhirnya menjadi masyarakat pengetahuan. Pada kondisi masyarakat peramu, untuk kelangsungan hidupnya cukup hanya mengandalkan daya tahan fisik dan naluri. Pada masyarakatpertanian tujuan hidupnya hanya untuk kebutuhan fisiologik dan cukup dengan mengandalkan kemampuan dan energi fisik. Pada masyarakat industri, masih berorientasi pada kebutuhan fisiologi dari orde yang sedikit lebih meningkat, dan cukup hanya mengandalkan keterampilan dan kecekatan dalam bekerja. Pada masyarakat pelayanan, orientasi kehidupan sudah mengarah pada kebutuhan hidup yang nyaman, dan cukup hanya mengandalkan kemampuan bekerja secara cerdas. Dan pada masyarakat golongan terakhir yaitu masyarakat berpengetahuan,orientasi hidupnya sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi,yaitu kehidupan yang harus serba bermakna, dan tidak cukup hanya mengandalkan berbagai kemampuan dan keterampilan pada masyarakat-masyarakat sebelumnya, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain secaracerdas.

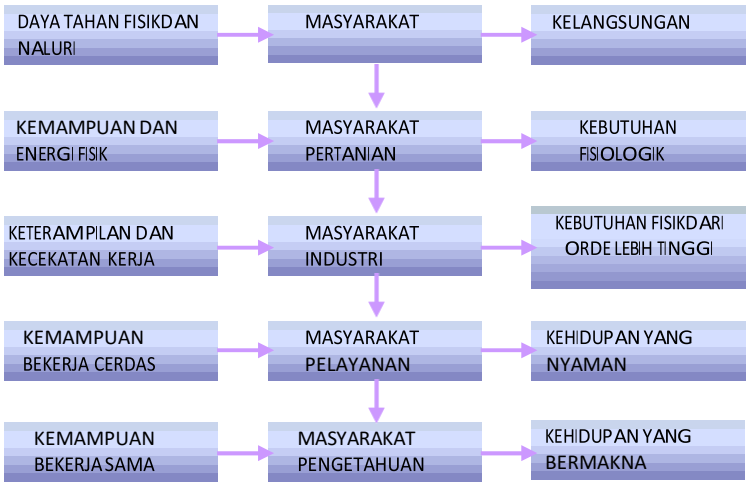

Hartanto, *Mengelola Perubahan di Era Pengetahuan*, 1999

Gambar 4.1
Gambaran Kondisi Masyarakat yang Dicita-citakan

Gambaran masyarakat seperti yang dikemukakan Hartanto tadi, pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan yang hakiki, yaitu aspek perilaku *(psiko-sosial)*, budaya dan politik, serta mata pencaharian. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi sehingga akan berpengaruh pula terhadap tingkatkesiapan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dalam persaingan global.

Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang hakiki kehidupan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya untuk secepatnya mempersiapkan kondisi masyarakat yang diinginkan tersebut, sehingga akan muncul kondisi masyarakat yang *serba siap* dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masa depan.

Masyarakat Kota Tasikmalaya yang serba siap tersebut, dapat diamati dari indikator-indikator sebagai berikut:

(1) *Besarnya Rasa memiliki* dari warga masyarakat Kota Tasikmalaya (termasuk kelembagaannya) terhadap program- program yang dirancang atau diluncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah kota dan pemerintah provinsi, maupunpemerintah pusat;

(2) *Kepercayaan diri yang mapan* dari masyarakat dan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya.

(3) *Besarnya Kemandirian atau keswadayaan* masyarakat Kota Tasikmalaya baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat hasil-hasil pembangunan;

Untuk meraih kondisi masyarakat yang dicita-citakan tersebutdiperlukan SDM yang memiliki ketangguhan dalam *keilmuan,keimanan, dan perilaku shaleh*, baik secara pribadi maupun sosial. Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial dibentuk dari keseimbangan antara ilmu, iman dan amal seseorang.

Dimensi-dimensi keshalehan pribadi seseorang mencakup shaleh dalam aqidah, ibadah, ahlak, dan keluarga. Keshalehan dalam aqidah adalah jiwa yang berwujud dalam motivasi untuk hidup lebih baik, dan semangat kejuangan ke arah yang lebih bermakna. Keshalehan dalam ibadah merupakan konsistensi terhadap tujuan hidup yang berwujud dalam disiplin, komitmen, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Keshalehan dalam akhlak ialah perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari aqidah dan ibadah. Dan kesalehan dalam keluarga merupakan perwujudan dari ketiganya (Solihin Abu Izzudin, *Zero to Hero,* 2006).

Potret individu yang memiliki keshalehan pribadi ialah orang- orang yang: (1) Suka mengajak kebaikan kepada orang lain, dengan contoh, teladan dan fasilitasi terhadap orang lain; (2) Berorientasi sebagai pemberi kontribusi, bukan sebagai peminta-minta; (3) Lapang dada terhadap perbedaan dan keragaman; (4)Respek terhadap keunikan orang lain.

Sedangkan potret individu yang memiliki keshalehan sosial ialah:

a. Orang yang paling kokoh sikapnya *(atsbatuhum mauqiifan),* mencakup kekokohan dalam: maknawiyah, fikriyah, da'awiyah, jasadiyah, dan kemandirian finansial;
b. Orang yang paling lapang dadanya *(arhabuhum shadran),* mengandung arti mampu menahan diri dan emosi ketika marah, menguasai keadaan, selalu berfikir positif dan mendoakan orang lain pada kebaikan, lapang dada dengan kebodohan orang lain, tidak mudah menyalahkan, tetapi membimbing dan mengarahkan, dan selalu berharap pada kebaikan;
c. Orang yang paling dalam pemikirannya *(a'maquhum fikran), b*erfikir alternatif dan berbeda sehingga menghasilkan solusi yang cerdas, memandang persoalan tidak dari kulitnya, tetapimendalami hingga ke akarnya, berfikir visioner jauh ke depan,di luar ruang, lebih cepat dan lebih cerdas dari masanya, menggunakan momentum keburukan untuk dijadikan kebaikan, mengasah pengalaman dan penderitaan untuk melahirkan sikap bijak dan empati, sensitif, luwes dan antisipatif;
d. Orang yang paling luas cara pandangnya *(aus'uhum nazharan), b*elajar sepanjang hayat secara serius dalam menguatkan spesialisasinya, mau menekuni sebuah keahlian sebagai amal unggulan, melakukan pembelajaran agar ahli di bidang yang ditekuninya, menghasilkan karya sebagai bukti meski sederhana, mau belajar menguasai ilmu kontemporer untuk menguatkan dan mengembangkan ilmu yang ditekuninya, mampu menghubungkan data global menjadi sebuah

kekuatan, bersiap selalu agar mampu berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain dengan keahlian-keahlianyang dimilikinya, dan mampu bekerjasama untuk memberdayakan potensi dirinya;

e. Orang yang paling rajin amal-amalannya *(ansyatuhum 'amalan), b*erdisiplin tinggi, bersemangat, konsisten, kontinyu, pantang menyerah, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain;

f. Orang yang paling solid penataan organisasinya *(aslabuhum tanzhiman),* rajin membangun rasa kebersamaan *(cohesiveness)* dan memunculkan gerakan kolektif *(collective movement),* selalu berpartisipasi pada kepentingan bersama sebab kontribusi yang paling besar ialah partisipasi;

g. Orang yang paling banyak manfaatnya *(aktsaruhum naf'an), b*erfikir, bertindak dan berkarya menghasilkan manfaat bukansaja bagi dirinya pribadi tetapi bermanfaat bagi orang lain, seperti halnya pepatah lama, "gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang", manusia mati meninggalkan amal shaleh yang bermanfaat bagi sesamanya.

Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial akan tercermin dalam kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan wujud konkrit unit organisasi masyarakat yang paling sederhana, tetapimemiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar. Keluarga yang shaleh merupakan keluarga dambaan setiap orang. Keluarga yangmemiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial merupakan tiang-tiang yang kokoh masyarakat dan bangsanya. Karena itu, bangsa yang berkualitas terdiri dari golongan masyarakat yang berkualitas, dan masyarakat yang berkualitas merupakan kumpulan keluarga-keluarga yang shaleh, dan keluarga yangberkualitas terdiri dari individu-individu yang memiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial.

C. Arah Kebijakan Pendidikan Dasar

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup, darisejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana dan alat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan warga negara.

Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga Negara adalah tanggungjawab bersama

antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu manajemen sistempembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dari perspektif manajemn.

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Visi Kota Tasikmalaya dengan Iman dan Taqwa, kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan indsutri termaju di jawa barat"

Demikian pula bahwa pembangunan iman dan taqwa merupakan fondasi pertama dan utama untuk pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam berbagai bidang lainnya. Tentu melalui pendidikan, Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan bidang-bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya.

Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini, masyarakat Kota Tasikmalaya yang mayoritas suku Sunda memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui memili makna yang mendalam adalah *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer.* Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk di bidang pendidikan. *Cageur* mengandung makna sehat jasmani dan rohani. *Bageur* berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. *Bener* yaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. *Pinter* artinya memiliki ilmu pengetahuan. *Singer* artinya kreatif dan inovatif.

Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang berfalsafahkan *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer* tersebut maka ditempuh pendekatan *social cultural heritage approach*. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktifmasyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan yang digulirkan pemerintah.

Aspek yang harus disadari oleh segenap komponenmasyarakat dan pemerintah di Kota Tasikmalaya adalah kondisidan kenyataan pahit sebagai gambaran 'prestasi' pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dewasa ini, berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya baik yang terkait dengan masalah kehidupan agama, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Dengan kata lain, kualitas pelayanan pendidikan yang rendah, rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, buruknya manajemen sistem pendidikan akan menjadi bagian dari problema yang berkepanjangan dalam menghadapi tantangan dan persaingan kehidupan di masa mendatang.

Mencermati realitas tersebut, diperlukan berbagai langkah inovasi dan penguatan strategi pembangunan pendidikan di setiap kecamatan dengan tidak hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (baik daerah maupun pusat),melainkan menggali keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu akselerator untuk menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan di disetiap kecamatan dan pedesaan.

Pembangunan pendidikan sebagai wahana pembangunan SDM yang berkualitas, tetap menjadi prioritas utama baik dalam pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan diprioritaskannya pembangunan pendidikan dalam dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota, untuk jangka waktu tahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahun ke depan. Hal inimenunjukkan betapa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara maupun suatu daerah.

Secara umum dalam lingkup kebijakan daerah, pemerintahan Kota Tasikmalaya berpedoman pula kedalam lingkup kebijakan makro pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengagendakan akselerasi dalam berbagai bidang pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan. Upaya tersebut diaktualisasikan dalam lima misi sebagai *Agenda Prioritas Pembangunan* untuk kurun waktu lima tahunan ke depan provinsi jawa barat dan kota Tasikmalaya

Selain itu berbagai wacana pendidikan yang berkembang di masyarakat melalui berbagai media juga perlu mendapatkan respon positif dari pemerintah. Wacana-wacana tersebut diantaranya desakan dari berbagai *stakeholders* pendidikan tentang pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen daritotal APBN maupun APBD, tindak kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar, moralitas dan akhlak para pelajar yang sering menimbulkan instabilitas.

Hal lain yang perlu mendapatkan kajian mendalam yaitu terdapatnya keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki danketimpangan antara realitas dan kebutuhan telah memberikan warna terhadap pengelolaan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Di samping itu potensi yang dimiliki antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama. Satu kecamatan memiliki keunggulan potensi, namun daerah lain memiliki berbagai keterbatasan. Kondisi ini menuntut perlakuan yang tidak sama agar pada akhirnya semua daerah bisa mencapai tujuan yang sama dalam waktu relatif sama.

Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkannya PP.No:19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka target pelayanan pembangunan pendidikan harus semakin ditingkatkan demi penyediaan pelayanan pembangunan pendidikan yang semakin berkualitas dan berkeadilan. Seluruh garis kebijakan tersebut dipola dalam target kebijakan nasional yang menyangkut pelayanan pembangunan pendidikan yakini: (1) Pemerataan dan Perluasan akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

1. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan

Tujuan dan sasaran dalam aspek pemerataan dan perluasankesempatan pendidikan, sebaiknya tidak hanya sekedar diarahkan pada upaya memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan hanya sekedar mewajibkan kepada masyarakat, akan tetapi harus disertai dengan tanggungjawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang pluralistik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yang dibutuhkan, maka tidak heran jika jumlah masyarakat yang mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang lebih rendah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang mampu menyekolahkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Makin tingginya biaya pendidikan sejalan dengan makin tingginya jenjang pendidikan merupakan konsekuensi logis dari peta sebaran lembaga pendidikan terhadap persebaran penduduk, karena materi dan proses pembelajaran yang membutuhkan alat dan sumber belajar yang lebih kompleks bahkan tidak jarang berteknologi tinggi, serta metode yang variatif dan inovatif memerlukan media yang variatif pula.

Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangka panjang dalam pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya dalam bidang ini ialah:

a. Tercapainya target wajib belajar 13 tahun.
b. Tercapainya keseimbangan jumlah dan kapasitas pelayanan kelembagaan PAUD dengan jumlah populasi PAUD yang ada pada setiap RW;
c. Tercapainya kesimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Dasar formal maupun nonformal dengan populasi anak usia wajib belajar sampai ke tingkat kelurahan;
d. Tercapainya keseimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Menengah formal maupun non formal dengan populasi anak Usia Wajib Belajar (AUWB) Dikmen 13 tahun;
e. Tingginya dukungan dan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pemerhati pendidikan, baik yang bersifat materiil, maupun non material dalam setiap perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendidikan;

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Peningkatan pemerataan dan perluasan akses berbarengan dengan peningkatan mutu menjadi suatu keniscayaan. Mutu,relevansi dan daya saing sebagai karakter yang melekat pada komponen input, proses dan output. Artinya output yang bermutu,memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsa pasar, dan sangat berarti pula dengan kepemilikan daya saing tinggi lebih banyak dihasilkan dari input dan proses yang bermutupula.

Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan,dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta suasana lingkungan pembelajaran. Ketersediaan komponen- komponen input tersebut pada kenyataannya belum memenuhi standar yang telah ditentukan secara nasional karena berbagai alasan.

Proses pendidikan adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia diramu dalam satu metode pembelajaran. Orientasi kurikulum pada dewasa ini menuntut kreativitas dan inovasi yang tinggi pada saat terjadi proses pembelajaran. Sejalan dengan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, kreativitas daninovasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih sering terjadi tenaga pendidik dan kependidikan terjebak pada rutinitas yang sudah nyaman dijalani. Pembinaan professional, diklat dan reorientasi yang diberikan pemerintah pun belum ditata dandilaksanakan secara terencana, terorganisasi, terkendali dan berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangka panjang dalam pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya dalam bidang ini ialah:

a. Tercapainya target-target pencapaian SNP pada setiap jenis satuan pendidikan baik yang berkenaan dengan penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan danprofesionalitas guru/ tutor/pamong belajar, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan.
c. Terpenuhinya kebutuhan tentang sarana dan prasarana (Sapras) dan sumber-sumber belajar yang relevan dalam pendukung penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup (*life skills)* dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan Standar nasional dan Internasional;
d. Meningkatnya lembaga satuan pendidikan (sekolah model) berbasis keunggulan dalam kecakapan hidup (life-skills), nilai- nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tatapergaulan/budi-pekerti,

teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kebangsaan, yang memiliki daya saing nasional dan international.

e. Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kemampuan teruji untuk bersaing baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikanlainnya mendapat penghargaan yang memadai;

f. Tercapainya proses pembelajaran berbasis TIK di seluruh mata pelajaran di setiap jenis kelembagaan satuanpendidikan.

Untuk mengatasi ketiga komponen mutu tersebut dibutuhkan beberapa kondisi, antara lain: (1) Adanya standarisasi untuk setiap komponen pendidikan baik yang menyangkut, input, proses, dan output pada setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan; (2)Adanya regulasi sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi yang berkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan pada setiap tingkatan kelembagaan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan dan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Adanya kebijakan yang mengatur standarisasi

D. Rencana Strategis Program Pembangunan Pendidikan tahun 2024-2029

Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2024-2028 pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yang memiliki daya saing internasional. Oleh karena itu, mulai Tahun 2024 sampai Tahun 2029, pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya, harus diarahkan pada keunggulan- keunggulan kompetitif pada tingkat nasional dan rintisan internasional, di samping harus mampu memantafkan Wajar dikdas 13 tahun. Pencapaian target daya saing internasional ini akan menjadi modal dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara pada tingkat internasional.

1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan pada peningkatan pelayanan bagi anak usia dini, penuntasan wajar dikdas 13 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Pemerataan dan perluasan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD

berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan bertaraf nasional dan international;

2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan nasional dan international;
3) Pemerataan dan perluasan peraalatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD nasional dan international;
4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD nasional dan international;
5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul nasional dan international.

b. Pendidikan Dasar

Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Pemerataan dan perluasan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI- MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar bertaraf nasional dan internasional;
2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu bertaraf nasional dan internasional;
3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, kelurahan dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikdas 13 Tahun;
7) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional.

c. Pendidikan Berkelanjutan

Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat nasional dan internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus keterampilan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, teknologi bertaraf nasional dan internasional;
2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional.

d. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender

Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:
1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf nasional dan internasional;
2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional.

e. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat

Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:
1) Pemerataan dan perluasan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul bertaraf nasional dan internasional.

f. Pendidikan Informal

Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatan pelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun pada tingkat internasional.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada peningkatan daya saing bertaraf nasional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Peningkatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan;
2) Peningkatan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul bertaraf nasional dan internasional;
3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana PAUD bertaraf nasional dan internasional;
4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
5) Peningkatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK bertaraf nasional dan internasional;
6) Peningkatan kreativitas dan anak dan guru/pembibing pada satuan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional;
8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.

b. Pendidikan Dasar

Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan daya saing bertaraf nasional dan internasional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis imtak, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan bertaraf nasional dan internasional;
2) Peningkatan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar bertaraf nasional dan internasional;
4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
5) Peningkatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan

dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;

6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/laboran/pustakawan pada satuan program pendiidkan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.

c. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat

Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat internasional, melalui:

1) Peningkatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul bertaraf nasional dan internasional;
2) Peningkatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional;
3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional dan internasional;
4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat bertaraf nasional dan internasional;
5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional;
6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat;

d. Pendidikan Informal

Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel.

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Aspek ini masih tetap berkenaan dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang sangat stabil dan solid. Dalam periode lima tahun ke depan, harus sudah diprioritaskan pada program- program yang bersifat akselerasi dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mendukung pencapaian pendidikan yang memiliki daya saing bertaraf nasional dan internasional.

a. Perencanaan dan Program

Kebijakan dalam perencanaan program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan

kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Peningkatan peran dan fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan Masa Depan;
2) Peningkatan fungsi dan peran rencana-rencana strategis pada setiap organisasi satuan pendidikan;
3) Peningkatan kemampuan aparatur perencana program pendidikan;
4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.

b. Organisasi Pelaksanaan Program

Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan peran standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan;
2) Peningkatan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan.

c. Pengawasan dan Pengendalian Program

Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengawasan pendidikan yang lebih produktif, transparan dan akuntabel, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan;
2) Peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dan pengendalian program pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan.

d. Evaluasi Program

Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program- program pembangunan pendidikan;
2) Peningkatan kemampuan aparatur penilaian program- program pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program

Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan yang diterima tanpa syarat, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan;
2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggungjawaban.

f. Penganggaran Biaya Program

Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan yang lebih efektif dan efisien, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan;
2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran program pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan.

g. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan walikota tentang POS kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders*
2) Peningkatan kemampuan tenaga hubungan masyarakat.
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.

h. Sistem Informasi Manajemen

Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK;
2) Peningkatan fungsi perlengkapan modern TIK pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
3) Peningkatan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK;
4) Peningkatan kesejahteraan pada unit SIM dan pemrosesan data.

i. Manajemen SDM

Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui:

1) Peningkatan fungsi dan peran perwalkot tentang *Grand Design* Manajemen SDM pendidikan.
2) Peningkatan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit

pengelola kepegawaian.

j. Administrasi Sarana Perlengkapan

Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:

1) Peningkatan fungsi dan peran perwalkoy tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah;
2) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan;
3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

Komponen-komponen kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Namun demikian, bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. prosedur operasional tentang kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dengan stakeholders pendidikan (masyarakat, dunia usaha dan kelembagaan masyarakat lainnya.


KOTA TASIKMALAYA
KOTA RESIK

BAB V
PENUTUP

A. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk kota Tasikmalaya untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan menargetkan APK dan APM-SD pada tingkat 100%, APK dan SMP/MTs 100%.

Berdasarkan data yang ada, wajar dikdas 9 tahun di kota Tasikmalaya sudah tercapai, sehingga perlu ditingkatkan dengan program Wajar Dikdas 13 tahun (plus paud 1 tahun) memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SMP/MTs/ yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan.

Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut. Wajar Dikdas 13 Tahun (plus paud 1 tahun) selain sesuai dengan target RPJPD kota Tasikmalaya, program wajar dikdas 13 tahun akan menambah jumlah lulusan SMA/SMK sederajat setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah.

Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA/SMK. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih

mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Tasikmalaya yang terus berubah.

B. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.

Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai religius yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan di kota Tasikmalaya diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemkot Tasikmalaya wajib mendorong dan membimbing satuan pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti).

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka

memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.

C. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan yang bercirikan *(a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas.*

Pemerintah kota Tasikmalaya perlu melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah kota Tasikmalaya dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah kota harus bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur pendidikan perlu

meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari.

Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan.

Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi, 2002, Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka.

Akdon, *Dedy Achmad Kurniady, Deni Darmawan, 2015 Manajemen pembiayaan pendidikan.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Cresswell, J.W., 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, London: SAGE Publication, International Educational and Professional.

Grindle, Merilee S., 1990, Politics and Policy Implementation in the Third World, NJ: Priceton Press.

Maswood, Javed, 2000, International Political Economy and Globalization, London: World Scientific Publishing Co.

Nataatmadja, Hidajat, 1982, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyebuhannya (Al-Furqon), Bandung: Penerbit Iqro.

Obsborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Mass: Addison-Wesley Publishing.

Patton, Carl V. & Sawicki, David S., 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003, Jakarta: CV. Ekajaya.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya 2023-2026, Tasikmalaya: Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya.

Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Universal.

Stewart, M. Aileen, 1994, Empowering People, Singapore: Pitman Publishing.

Sweeney, Paul D., & Dean B. McFarlin, 2002, Organizational Behavior: Solution for Management, International Edition, Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Tim Perumus, Mater Plan Pendidikan kabupaten Bandung 2008-2025, 2027, Bappeda Kab Bandung.

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO, 2001, EFA Planing Guide: Southeast and East Asia, Bangkok: Unesco.

Wolf Greinert, D., 1992, The Dual System of Vocational Training in The Federal Republic of Germany, Eschborn: Holland-Josenhouse, GT2.

World Bank. 2002, Globalization, Growth and Poverty: Building and Inclusive World Economy, New York: A Publication of the World Bank and Oxford University Press.

Yin Cheong CHENG, 2003, “New Principalship for Globalization, Localization and Individualization: Paradigm Shift”, The International Conference on Principalship and School Management Practice in the Era of Globalization: Issues and Challenges, The University of Malaya City Campus, Kuala Lumpur, 22-24 April 2003, http://www.ied.edu.hk/cric/

Yoyon Bahtiar Irianto & Uyu Wahyudin, 2003, “Pendekatan dan Metodologi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat”, Visi: Media kajian Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Nomor: 14/TH.XI/2003.

Yoyon Bahtiar Irianto, 2000, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten

Sumber Internet dan Website

Tasikmalaya dalam Angka tahun 2023, 2023 diakses 24 Agustus 2023 dari https://tasikmalayakota.bps.go.id/

Data Pokok Kependudukan dan sosial, 2023 diakses Agustus dari https://data.tasikmalayakota.go.id/

Neraca Pendidikan kota Tasikmalaya tahun 2021,-2023 diakses agustus 2023 dari https://npd.kemdikbud.go.id/?

Lampiran

RAMBU- RAMBU PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
   1. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pendidikan dasar di kota Tasikmalaya.
   2. Menganalisis potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di kota Tasikmalaya.
   3. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah kota Tasikmalaya dalam menyusun kebijakan dan strategi program untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di kota Tasikmalaya.

B. Sumber Data
   1. Studi dokumentasi yang bersumber dari data-data yang tersedia secara *offline* dan *online.*
   2. Hasil dari Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk melengkapi data yang diperlukan.

C. Pengumpulan data melalui:
   1. Studi Dokumentasi:

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sumber Data
1.	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	1. Jarak tempuh ke sekolah: • Jarak rata-rata antara lokasi tempat tinggal peserta didik dengan sekolah terdekat.(SD/MI, SMP/Sederajat) • Jumlah peserta didik yang tinggal dalam jarak akses yang wajar (misalnya, 5 km) dari sekolah. 2. Jumlah sekolah: • Jumlah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK)se-derajat • Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk (APK, APM dan APS)	Disdik Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya Dishub, Diskominfo

	3. Ketersediaan fasilitas pendukung: • Ketersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi umum, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang mempengaruhi akses ke sekolah. • Ketersediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi di sekitar sekolah.	Dinkes Disdik Kota Tasikmalaya
	4. Ketersediaan guru: • Jumlah guru yang tersedia di setiap sekolah. • Rasio guru dan peserta didik di setiap sekolah.	Disdik Kota Tasikmalaya
	5. Aksesibilitas bagi kelompok rentan: • Persentase peserta didik dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan yang inklusif. • Persentase peserta didik dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah yang dapat mengakses pendidikan dengan biaya yang terjangkau.	Disdik, Dinsos Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya
	6. Tingkat partisipasi sekolah: • Persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif di sekolah. • Persentase anak usia sekolah yang tidak mengalami putus sekolah.	Disdik Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya
	7. Faktor sosial dan budaya: • Persentase anak perempuan yang mendapatkan akses yang setara ke pendidikan. • Persentase anak-anak dari kelompok etnis minoritas yang mendapatkan akses yang setara ke pendidikan.	Disdik Kota Tasikmalaya Disdik Kota Tasikmalaya
	8. Akses teknologi: • Ketersediaan akses internet dan komputer di sekolah dan lingkungan sekitar.	

2.	Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Mengacu ke Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 standar 1. Standarisasi Guru 1. 4 Kompentensi Guru 1. Pedagogik 2. Sosial 3. Profesional 4. Kepribadian 2. Standarisasi Kurikulum a. Standar Isi b. Standar Proses 3. Standarisasi Peserta didik 1. Standar Penilaian 4. Standarisasi Manajemen Pembiayaan dan Sarana prasarana a. Standar Sarana dan Prasarana b. Standar Pengelolaan c. Standar pembiayaan	1. UU Guru dan Dosen 2. SNP 3. Dapodik 4. DisdikUntuk 8 standar rekap rapor pendidikan sekolah
3.	Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan	1. Akreditasi Sekolah pada semua jenis dan jenjang 2. Laporan temuan dan hasil akreditasi. 3. Transparansi: Mengukur sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan administratif di dalam institusi pendidikan dapat dipahami dan diakses dengan jelas oleh masyarakat. Ini mencakup ketersediaan informasi tentang kebijakan, program, anggaran, dan kinerja lembaga. 4. Partisipasi Masyarakat: Mengukur sejauh mana masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pengelolaan pendidikan. Ini mencakup	1. Disdik

forum atau mekanisme partisipasi seperti rapat umum, kelompok advokasi, atau dewan sekolah.

5. Akuntabilitas Keuangan: Mengukur transparansi dan pengelolaan dana yang dihabiskan dalam pendidikan. Ini mencakup pengelolaan anggaran, akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, dan audit keuangan yang teratur.
6. Evaluasi Kinerja: Mengukur keberhasilan institusi pendidikan dalam mencapai tujuan mereka, seperti tingkat kelulusan peserta didik, prestasi akademik, dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Evaluasi juga dapat mencakup penilaian kinerja guru dan staf administrasi.
7. Kepuasan Stakeholder: Mengukur kepuasan dan persepsi orang tua, peserta didik, guru, dan masyarakat umum terhadap mutu dan layanan pendidikan yang disediakan oleh institusi. Ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan atau umpan balik yang terstruktur.
8. Reputasi dan Citra: Mengukur persepsi positif atau negatif masyarakat terhadap institusi pendidikan. Ini dapat melibatkan pengukuran reputasi di antara pemangku kepentingan utama, tingkat kepercayaan masyarakat, atau pengaruh dan peringkat institusi dalam masyarakat.
9. Kepatuhan Hukum dan Etika: Mengukur sejauh mana institusi pendidikan mematuhi peraturan hukum dan standar

	etika dalam operasional mereka. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang pendidikan, etika profesional guru, perlindungan privasi peserta didik, dan prinsip-prinsip anti-diskriminasi. 10. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat: Mengukur sejauh mana institusi pendidikan merespons dan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta kesesuaian program pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.	